



**BADAN
KESATUAN
BANGSA DAN
POLITIK
KABUPATEN
PESISIR SELATAN**

2025

LKJ

LAPORAN KINERJA



Jalan Rohana
Kudus – Painan

Email:
kesbangpolkabpessel7@gmail.com



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025 telah selesai di susun.

Laporan Kinerja (LKj) merupakan salah satu cara perbaikan kinerja organisasi yang harus terus dilakukan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan. Laporan ini disusun secara periodik berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, maka setiap Instansi Pemerintah harus menyusun Laporan Kinerja (LKj).

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang berupaya melakukan berbagai Program dan Kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, mulai dari perencanaan, pelaksanaan anggaran dan pencapaian hasilnya, serta pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah ini.

Dalam pelaksanaan Program/kegiatan dalam tahun anggaran 2025, masih ditemui beberapa kendala-kendala dalam pelaksanaannya namun dengan dukungan berbagai pihak terutama Pengguna Anggaran, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan instansi terkait, semua hambatan-hambatan tersebut dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Laporan ini akan dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan program dan kegiatan dimasa yang akan datang agar semakin baik dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Pesisir Selatan.

Poinan, 23 Februari 2026
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Pesisir Selatan



MARZAN, S.H., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP. 19700316 198903 1 001



IKHTISAR EXECUTIVE

Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 disusun sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam Peraturan Presiden tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Oleh karena itu, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah, harus pula mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dalam bentuk penyampaian Laporan Kinerja (LKj).

Penyusunan LKj ini dimaksudkan untuk mempertanggungjawabkan perwujudan Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan melalui tujuan dan sasaran strategis. Tujuan dan sasaran strategis dicapai melalui kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Pesisir Selatan serta terciptanya sistem pelaporan akuntabilitas yang dapat meningkatkan kepercayaan terhadap Pemerintah, dan meningkatkan kinerja instansi Pemerintah dalam menjalankan misi, serta diharapkan dapat terciptanya Kepemerintahan yang baik (*good governance*).

Penyusunan LKj Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 ini, disusun dengan berpedoman pada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Sistem



Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari penilaian yang sistemik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator masukan, keluaran, dan hasil. Secara rinci pengukuran kinerja tersebut dilakukan dengan mengevaluasi sasaran strategis yang didukung oleh Program/Kegiatan yang bersumber dari Dana APBD Kabupaten.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, khususnya pada Misi Keenam, yaitu **Mewujudkan Kondisi Masyarakat Yang Aman Tentram Dan Dinamis** maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan menetapkan tujuan, yaitu (1) Terwujudnya Reformasi Birokrasi Yang Berkinerja Tinggi (2) Terciptanya Kondisi Masyarakat Pesisir Selatan Yang Aman, Tentram dan Dinamis. Tujuan tersebut dijabarkan melalui 3 (tiga) sasaran strategis, yaitu (1) Terwujudnya Pemerintahan Yang Akuntabel dan Berkinerja (2) Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah (3) Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan dan Menjaga Lingkungan secara Mandiri. Maka, untuk mewujudkan itu semua, ditetapkan Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2025 yang dapat dilihat target dan capaiannya secara lengkap pada tabel berikut :



Misi 6 : Mewujudkan Kondisi Masyarakat Yang Aman Tentram dan Dinamis

Tabel I. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	Satuan	Target	Realisasi capaian	% Capaian	Predikat
1.	Terwujudnya Pemerintahan Yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Tanpa Satuan	A (82)	*A (81,97)	*99.98	*Sangat Memuaskan (Menunggu Hasil Penilaian SAKIP)
2.	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi PD	Tanpa Satuan	91	68	75	Sangat Inovatif
3.	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dan Menjaga Lingkungan Secara Mandiri	Cakupan pencegahan atau tangkal dini konflik	Persen	100%	100%	100	Sangat Baik
		Cakupan Peningkatan Pendidikan Wawasan Kebangsaan dan Pendidikan Politik	Persen	60%	69%	115	Sangat Baik
		Rata-rata Capaian				97.42	Sangat Baik

*Nilai LKj tahun 2024

Dari 3 Sasaran Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan 4 indikator kinerja, dimana 3 (tiga) indikator dapat dilaksanakan dengan **sangat baik** dan **sangat inovatif** dan 1 indikator sasaran yang masih dalam proses penilaian yaitu indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Evaluasi atas rata-rata data pendukung dan permasalahan pada setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian Badan Kesatuan Bangsa



dan Politik, untuk merumuskan kembali program dan kegiatan yang benar benar menunjang secara langsung pencapaian target dan sasaran.

Hasil evaluasi capaian kinerja diharapkan dapat dijadikan acuan dalam penentuan kebijakan dimasa mendatang dan dapat memberikan kontribusi positif dalam penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Poinan, 23 Februari 2026
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Pesisir Selatan



MARZAN, S.H., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP. 19700316 198903 1 001



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EXECUTIVE	iii
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GRAFIK	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.2 MAKSUD DAN TUJUAN	2
1.3 STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA.....	4
1.4 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI DAN PERMASALAHAN UTAMA	13
1.5 LANDASAN HUKUM.....	15
1.6 SISTEMATIKA PENYUSUNAN.....	16
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	20
2.1 RENCANA STRATEGIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PEISIR SELATAN TAHUN 2021-2026	20
2.2 RENCANA KINERJA.....	24
2.3 PERJANJIAN KINERJA	27
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	31
3.1 METODOLOGI PENILAIAN CAPAIAN TARGET KINERJA	31
3.2 HASIL PENGUKURAN KINERJA	32
3.3 CAPAIAN KINERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PESISIR SELATAN	36
3.4 REALISASI ANGGARAN	90
BAB IV PENUTUP	92
4.1 KESIMPULAN	92
4.2 SARAN	93
LAMPIRAN	95



DAFTAR TABEL

Tabel I. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025	v
Tabel 1.1. Komposisi Aparatur pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 Berdasarkan Jenis Kelamin.....	8
Tabel 1.2. Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan	9
Tabel 1.3. Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan.....	10
Tabel 1.4. Komposisi Pegawai Berdasarkan Penempatan pada Masing-Masing Bidang Tahun 2025.....	11
Tabel 2.1. Rasionalisasi Target Kinerja (Renstra)	23
Tabel 2.2. Rencana Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025 .	24
Tabel 2.3. Rencana Kinerja Tahunan	25
Tabel 2.4. Sasaran Strategi, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Program Pendukung Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan.....	26
Tabel 2.5.a Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025	27
Tabel 2.5.b Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 (Hasil Rasionalisasi).....	29
Tabel 2.6. Program dan Anggaran pada Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025	30
Tabel 3.1. Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2025	32



Tabel 3.2. Hasil Pengukuran Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025.....	33
Tabel 3.3. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis I	37
Tabel 3.4. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis I Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir.....	39
Tabel 3.5. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis I Dengan Target dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi	41
Tabel 3.6. 7 Kategori Penilaian Terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Sasaran Strategis I Instansi Pemerintah	43
Tabel 3.7. Benchmarking Nilai AKIP Kabupaten Pesisir Selatan dengan Kabupaten/Kota Lain	44
Tabel 3.8. Capaian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025 ..	47
Tabel 3.9. Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran Strategis I	55
Tabel 3.10. Kondisi Sumber Daya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan	56
Tabel 3.11. Capaian Program dan Kegiatan Sasaran Strategis I Tahun 2025 ..	57
Tabel 3.12. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis II	58
Tabel 3.13. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Sasaran Strategis II Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir.....	60
Tabel 3.14. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis II dengan Target Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi	62
Tabel 3.15. Skor dan Kategori Indeks Inovasi Daerah Tahun 2025	62
Tabel 3.16. Analisis Keberhasilan/ Kegagalan Kinerja Sasaran Strategis II.....	63



Tabel 3.17. Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran Strategis II.....	64
Tabel 3.18. Capaian Program dan Kegiatan Sasaran Strategis II Tahun 2025	65
Tabel 3.19. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Sasaran Strategis III	66
Tabel 3.20. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran Strategis III Tahun 2025 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	68
Tabel 3.21. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis III Dan Target dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi...	70
Tabel 3.22. Benchmarking Cakupan Pencegahan atau Tangkal Dini Konflik Kabupaten Pesisir Selatan dengan Kabupaten/Kota Lain.....	72
Tabel 3.23. Analisis Keberhasilan/ Kegagalan Kinerja Sasaran Strategis III.....	73
Tabel 3.24. Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja	74
Tabel 3.25. Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja	77
Tabel 3.26. Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran Strategis III	86
Tabel 3.27. Capaian Program dan Kegiatan Sasaran Strategis III Tahun 2025	88
Tabel 3.28. Realisasi Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	



Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025	91
--	----



DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1. Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin	9
Grafik 1.2. Konposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	10
Grafik 1.3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan.....	11
Grafik 1.4. Persentase Komposisi Pegawai Berdasarkan Penempatan pada Masing-Masing Bidang Tahun 2025	12
Grafik 3.1. Capaian Kinerja Nilai AKIP Perangkat Daerah	34
Grafik 3.2. Capaian Kinerja Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah.....	35
Grafik 3.3. Capaian Kinerja Cakupan Pencegahan atau Tangkal Dini Konflik.....	35
Grafik 3.4. Capaian Kinerja Cakupan Peningkatan Pendidikan Wawasan Kebangsaan dan Pendidikan Politik	36
Grafik 3.5. Perbandingan antara Target dan Realisasi Indikator Kinerja Nilai AKIP Perangkat Daerah Tahun 2021 s/d 2025	39
Grafik 3.6. Nilai AKIP.....	44
Grafik 3.7. Perbandingan antara Target dan Realisasi Indikator Kinerja Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah Tahun 2021 s/d 2025	60
Grafik 3.8. Jumlah Konflik yang ditangani dari Tahun 2021 – 2025	66
Grafik 3.9. Peningkatan Jumlah Ormas yang Mendaftar sesuai dengan Regulasi dari Tahun 2021 – 2025.....	67
Grafik 3.10. Pendidikan Partai Politik Tahun 2025	69
Grafik 3.11. Jumlah Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun 2025.....	70



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan	7
Gambar 3.1. Upload Dokumen Perencanaan Kinerja di Website Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan	45
Gambar 3.2. Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025	46
Gambar 3.3. Asistensi Penyusunan Laporan Kinerja dengan Bagian Organisasi	48
Gambar 3.4. Dokumen LKj dan Laporan Hasil Evaluasi LKj Tahun 2024	48
Gambar 3.5. Dokumentasi Rapat Evaluasi Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan	49
Gambar 3.6. Instagram Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan	53
Gambar 3.7. Youtube Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan	54
Gambar 3.8. Website Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan	54
Gambar 3.9. Google Drive SiUCuP	58
Gambar 3.10. Nilai Kematangan Inovasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pada Aplikasi IGA	59
Gambar 3.11. Aksi Demonstrasi Mahasiswa dengan Pimpinan Daerah	75
Gambar 3.12. Aksi Demonstrasi Masyarakat dengan Pihak Galian C	76
Gambar 3.13. Aksi Demonstrasi Warga Nagari Silaut Gelar Aksi Damai,	



Desak PT Sukses Jaya Wood Kembalikan Lahan	76
Gambar 3.14. Upacara Hari Besar Nasional	79
Gambar 3.15. Gerakan Nasional Pembagian 10 Juta Bendera Merah Putih	79
Gambar 3.16. Pembentukan Paskibraka	80
Gambar 3.17. Dokumentasi Kegiatan pada Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan serta Pendidikan Politik	81



DAFTAR LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025.....	96
2. Indikator Kinerja Utama pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 – 2026	100



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, maka setiap Instansi Pemerintah harus menyusun Laporan Kinerja (LKj).

Laporan Kinerja merupakan bentuk pertanggung jawaban atas capaian kinerja organisasi/Instansi Pemerintah secara transparan dan akuntabel, untuk itu pada setiap akhir tahun anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang sebelumnya merupakan bagian pada Sekretariat Daerah sebagai salah satu Perangkat Daerah (PD) pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang terbentuk berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik maka menyusun Laporan Kinerja. Laporan Kinerja ini disusun untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2025. Akuntabilitas kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik diwujudkan melalui pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja program dan kegiatan yang menjadi tujuan dalam sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Penyusunan LKj dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LKj Badan Kesatuan Bangsa dan Politik disampaikan kepada

Bupati Pesisir Selatan untuk dikompilasi menjadi LKj Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, setiap Entitas Akuntabilitas Kinerja (wajib) menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Entitas Akuntabilitas Kinerja tersebut menyelenggarakan SAKIP secara berjenjang, dengan tingkatan mulai dari entitas akuntabilitas kinerja satuan kerja, hingga entitas akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Kinerja (LKj) adalah pengukuran dan evaluasi kinerja, serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Dengan adanya Laporan Kinerja (LKj), dapat diketahui tingkat capaian kinerja suatu unit organisasi dan hal lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya, terutama gambaran mengenai tingkat kesesuaian antara program dan kegiatan yang direncanakan dengan realisasinya.

Laporan ini dapat juga digunakan sebagai acuan dalam menyusun rencana kinerja dan rencana anggaran di tahun mendatang. Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Format Laporan Kinerja (LKj) pada dasarnya menyajikan informasi tentang uraian singkat organisasi; rencana dan target kinerja yang ditetapkan; pengukuran kinerja; dan evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud (termasuk analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya).

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

A. Maksud Penyusunan LKj

Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan adalah:

1. Penguatan Kesatuan Bangsa

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik aktif melaksanakan program-program yang bertujuan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa di Kabupaten Pesisir Selatan. Ini meliputi kegiatan sosialisasi nilai-nilai Pancasila, toleransi, dan keberagaman dalam masyarakat.

2. Pengelolaan Ketahanan Nasional dan Politik

Badan ini bertanggung jawab dalam mengelola dan meningkatkan ketahanan nasional melalui pengawasan dan pembinaan terhadap organisasi masyarakat, lembaga politik, serta pengembangan wawasan kebangsaan di tingkat lokal.

3. Pengawasan dan Evaluasi Organisasi Kemasyarakatan

Melakukan pengawasan terhadap keberadaan, kegiatan, dan keberlangsungan organisasi kemasyarakatan di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan agar tetap berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Pelaksanaan Program Pendidikan Politik dan Sosialisasi

Menyelenggarakan program pendidikan politik dan sosialisasi hak dan kewajiban warga negara kepada masyarakat, terutama generasi muda, guna menciptakan kesadaran berbangsa dan bernegara.

5. Penanganan Konflik Sosial dan Pemeliharaan Harmoni Sosial

Badan ini juga memiliki peran dalam penanganan konflik sosial serta pemeliharaan harmoni sosial melalui mediasi dan kegiatan-kegiatan yang memperkuat toleransi dan kerukunan antar warga.

Maksud disusunnya Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 ini adalah untuk memberikan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintahan di bidang Politik yang jelas, transparan, dan dapat

dipertanggungjawabkan serta sebagai wujud pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pencapaian target sasaran tahun 2025.

B. Tujuan Penyusunan LKj

Adapun tujuan penyusunan Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Aspek Akuntabilitas Kinerja

Bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 sebagai sarana pertanggung jawaban Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Tahun 2025 atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama tahun 2025. Esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah dicapai selama tahun 2025.

2. Aspek Manajemen Kinerja

Bagi keperluan internal organisasi, menjadikan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh manajemen Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 bagi upaya -upaya perbaikan kinerja di masa datang.

1.3. STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan berkedudukan di Jalan Rohana Kudus Painan Kecamatan IV Jurai. Gedung kantor dengan kondisi yang kurang baik dan fasilitas yang masih kurang lengkap. Adapun gedung Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ini merupakan Gedung Dinas Lingkungan Hidup yang saat ini bergabung dengan Dinas Perkimtan Kabupaten Pesisir Selatan.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas membantu pimpinan daerah mewujudkan visi dan misi daerah dengan fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan Politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Pelaksanaan fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah;
6. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan dipimpin oleh Kepala Badan yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh :

1. Sekretariat, membawahi :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Program Anggaran dan Keuangan.

2. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama membawahi :

- a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub –Substansi Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama.

3. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, membawahi :

- a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub – Substansi Penanganan Konflik.

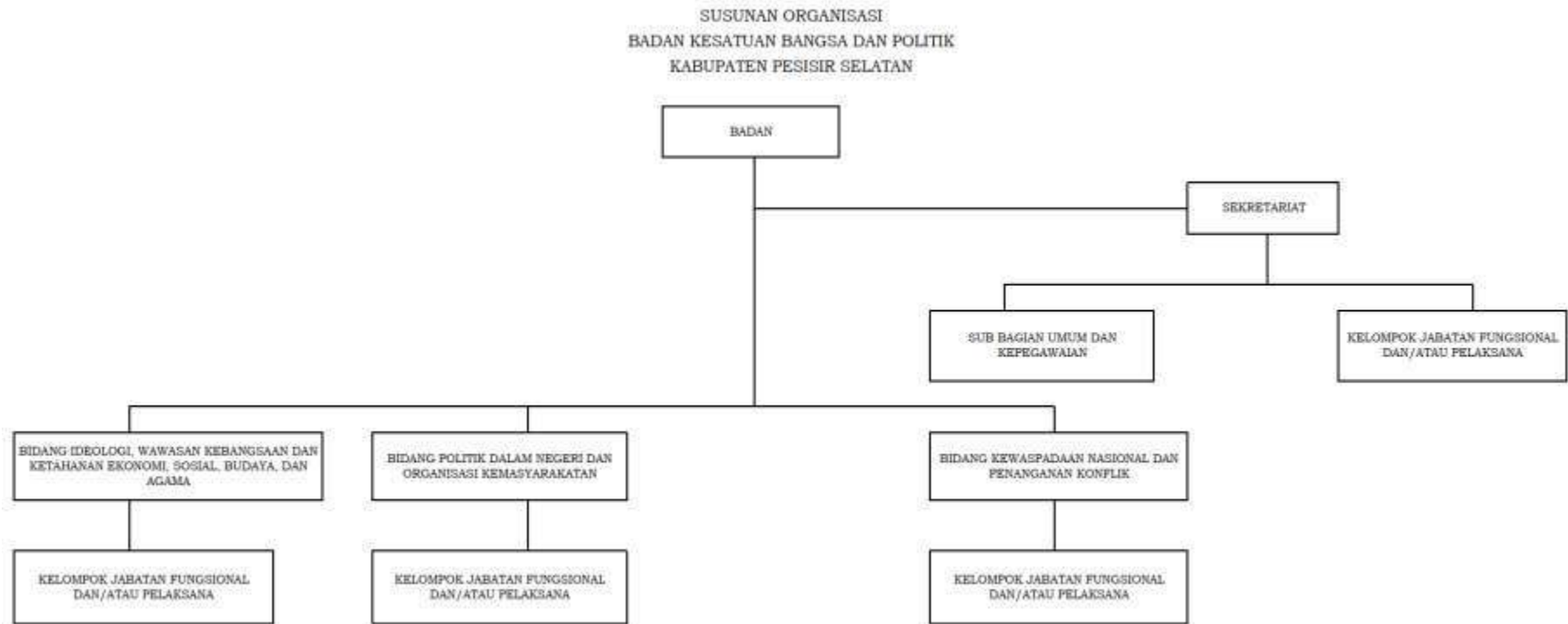
4. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan, membawahi:

- a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Politik Dalam Negeri;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub- Substansi Organisasi Kemasyarakatan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 34 Tahun 2024 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok, fungsi, tata kerja Badan Kesatuan



Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan memiliki struktur organisasi sebagai berikut:



Gambar 1.1. Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan

Sumber : Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 34 Tahun 2024

Dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan memiliki Sumber Daya Aparatur dengan jumlah total ASN 23 orang dan Non ASN 11 orang per 31 Desember 2025. sebagaimana tergambar pada tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1 Komposisi Aparatur pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 Berdasarkan Jenis Kelamin

No	JABATAN	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	Kepala Badan	-	-	-
2	Sekretaris Badan	1	-	1
3	Kepala Bidang	3	-	3
4	Kepala Sub Bagian	-	1	1
5	Jabatan Fungsional	-	3	3
6	Penelaah Teknis Kebijakan	5	2	7
7	Pengadministrasian Perkantoran	1	1	2
8	PPPK	1	2	3
9	PPPK Paruh Waktu	1	2	3
10	Non ASN	1	10	11
Total		13	21	34
% terhadap Jumlah Pegawai		38.24	61.76	100

Sumber: Subbag Umum dan Kepegawaian (Kondisi Desember 2025)

Secara grafik komposisi pegawai berdasarkan jenis kelamin disajikan pada grafik 1.1 berikut:



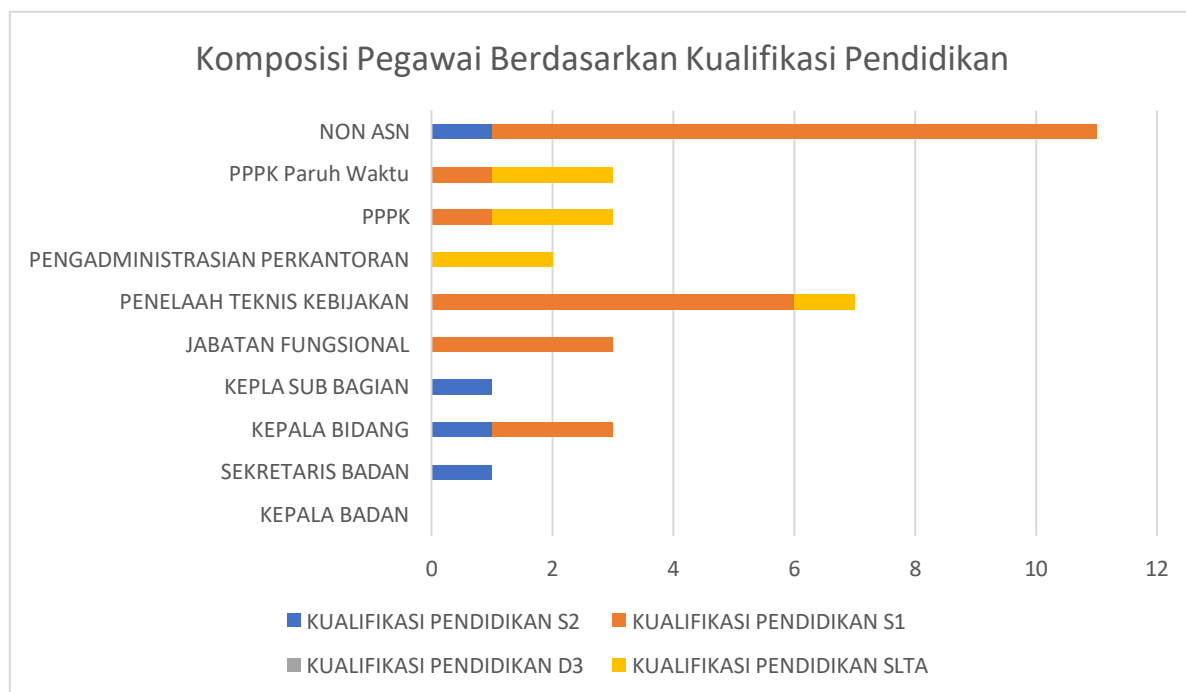
Tabel 1.2. Komposisi Aparatur Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN				JUMLAH
		S2	S1	D3	SLTA	
1	Kepala Badan	-	-	-	-	0
2	Sekretaris	1	-	-	-	1
3	Kepala Bidang	1	2	-	-	3
4	Kepala Sub Bagian	1	-	-	-	1
5	Jabatan Fungsional	-	3	-	-	3
6	Penelaah Teknis Kebijakan	-	6	-	1	7
7	Pengadministrasian Perkantoran	-	-	-	2	2
8	PPPK	-	1	-	2	3
9	PPPK Paruh Waktu	-	1	-	2	3
10	Non ASN	1	10	-	-	11
Total		4	23	-	7	34
% terhadap Jumlah Pegawai		11.76	67.65	-	20.59	100

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian (Kondisi Desember 2025)

Dilihat dari segi pendidikan, komposisi Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan sudah cukup memadai untuk melaksanakan tugas dan fungsi Badan Kesbangpol yang mana 67.65% sudah berpendidikan Sarjana (Strata 1) dan 20.59% lagi berpendidikan SLTA sederajat. Untuk pegawai yang berpendidikan SLTA

sederajat perlu adanya pengarahan untuk pengembangan karir yang lebih baik seperti diklat teknis, diklat gelar maupun diklat fungsional. Secara grafik komposisi pegawai berdasarkan kualifikasi pendidikan dapat disajikan pada grafik 1.2 berikut :

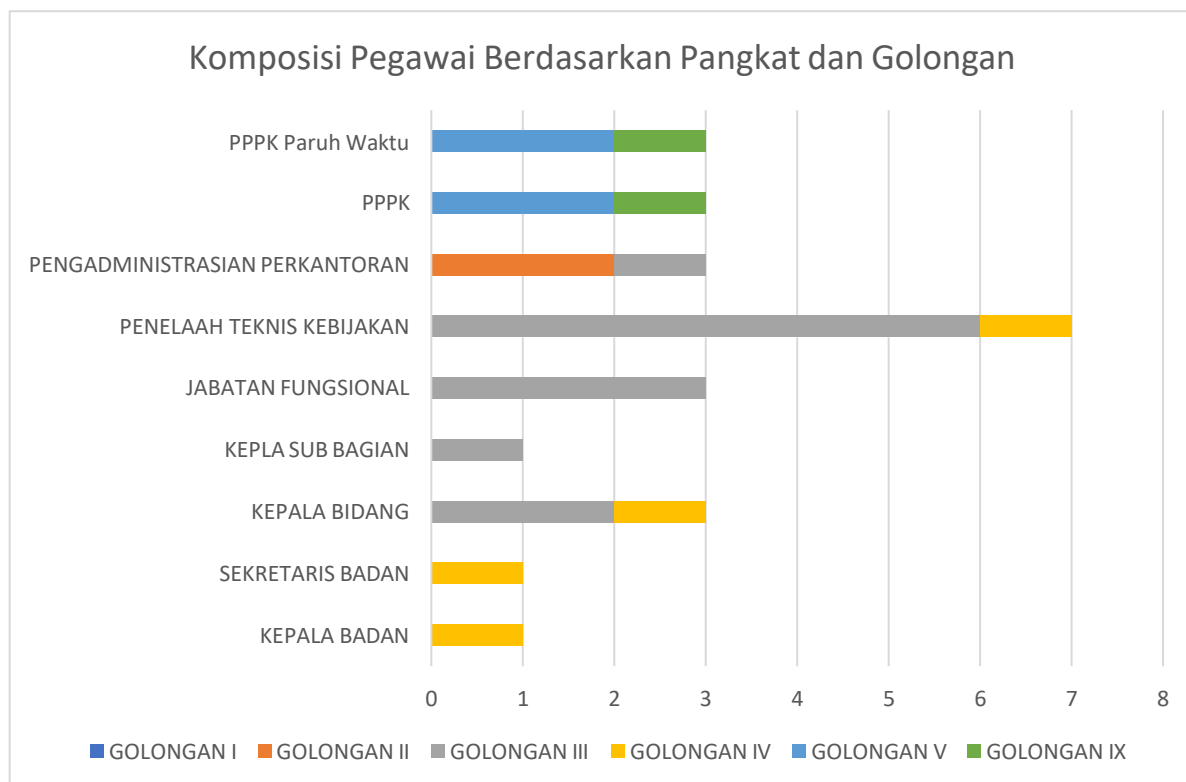


Tabel 1.3. Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan

NO	JABATAN	GOLONGAN						JUMLAH
		I	II	III	IV	V	IX	
1	Kepala Badan	-	-	-	-	-	-	0
2	Sekretaris	-	-	-	1	-	-	1
3	Kepala Bidang	-	-	1	2	-	-	3
4	Kepala Sub Bagian	-	-	1	-	-	-	1
5	Jabatan Fungsional	-	-	3	-	-	-	3
6	Penelaah Teknis Kebijakan	-	-	7	-	-	-	7
7	Pengadministrasian Perkantoran	-	2	-	-	-	-	2
8	PPPK	-	-	-	-	2	1	3
9	PPPK Paruh Waktu	-	-	-	-	2	1	3
TOTAL		-	2	12	3	4	2	23
% terhadap Jumlah Pegawai		-	8.70	52.17	13.04	17.39	8.70	100

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian (Kondisi Desember 2025)

Sebagaimana diuraikan tabel diatas, tercatat 52.17% Pegawai Badan Kesbangpol sudah golongan III, secara grafik komposisi pegawai berdasarkan golongan disajikan pada grafik 1.3 berikut ini :

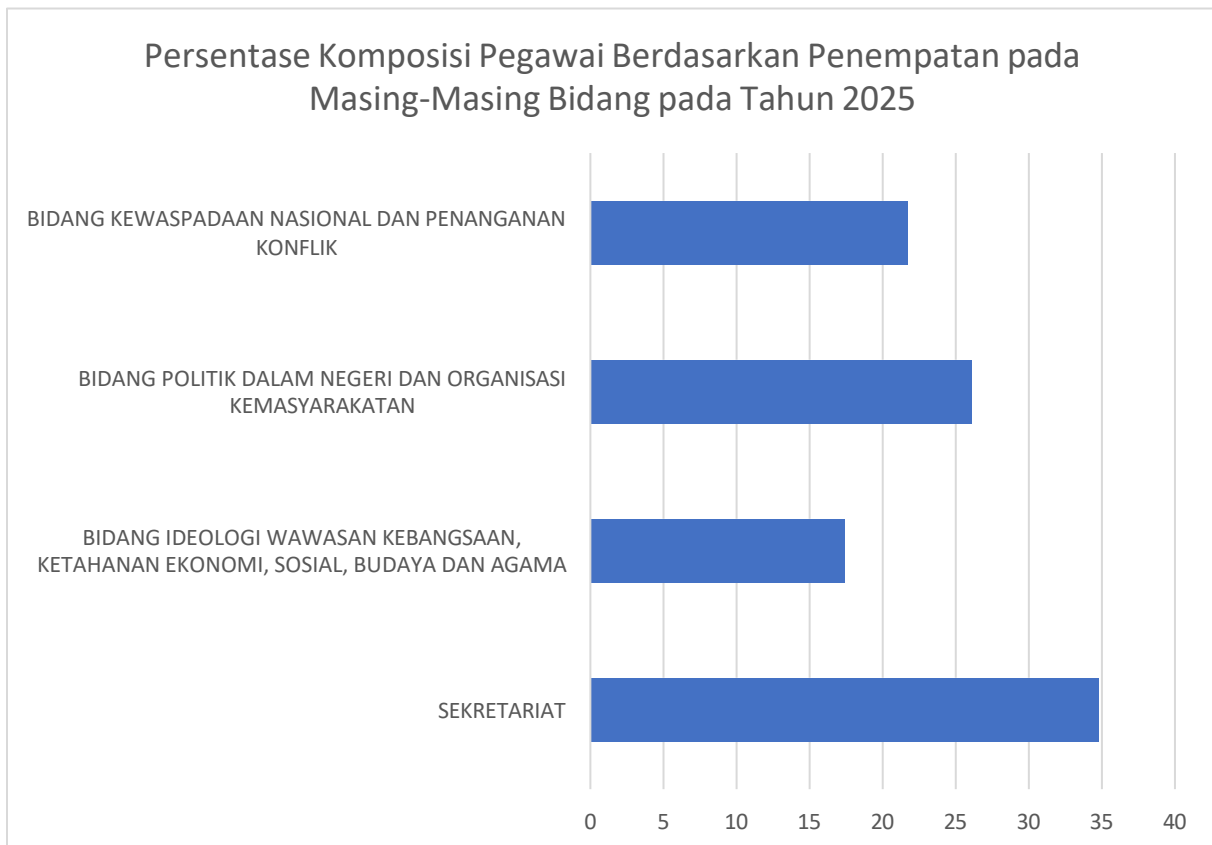


Tabel 1.4. Komposisi Pegawai Berdasarkan Penempatan pada Masing-Masing Bidang Tahun 2025

No.	Bidang	Jumlah	Persentase
1.	Sekretariat	8	34.78%
2.	Bidang Ideologi wawasan Kebangsaan, Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama	4	17.39%
3.	Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan	6	26.09%
4.	Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	5	21.74%
	Jumlah	23	100%

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian (Kondisi Desember 2025)

Berdasarkan uraian tabel diatas tercatat 34.78% pegawai berada di Sekretariat, sedangkan jumlah pegawai pada Bidang Ideologi wawasan Kebangsaan, Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama memiliki persentase 17.39%, pada bidang Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan memiliki persentase pegawai sebanyak 26,09% dan pada bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik memiliki persentase pegawai sebesar 21.74%, secara grafik komposisi pegawai berdasarkan penempatan pada masing-masing bidang tahun 2025 disajikan pada grafik 1.4 berikut ini :



1.4 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI DAN PERMASALAHAN UTAMA

Isu-isu strategis pembangunan di bidang kesatuan bangsa dan politik Kabupaten Pesisir Selatan untuk 5 (lima) tahun ke depan, yaitu:

1. Meminimalkan terjadinya konflik.

Peningkatan upaya pencegahan dan penyelesaian konflik di tengah masyarakat baik konflik politik dalam pemilu, konflik sosial akibat kesenjangan ekonomi, konflik keagamaan akibat perbedaan paham keagamaan, konflik industrial yang berkaitan dengan upah, konflik lahan dan sumber daya alam. Selain itu juga akan diupayakan penguatan kerukunan antar umat beragama dan penganut aliran-aliran kepercayaan dalam menjaga ketahanan bangsa;

2. Memperkuat karakter kebangsaan.

Pemantapan wawasan kebangsaan, ideologi pancasila, pembauran kebangsaan, kesadaran dan kemampuan bela negara serta pembangunan karakter bagi masyarakat;

3. Optimalisasi pencegahan penyakit masyarakat dan kenakalan remaja.

Koordinasi antar Lembaga diperintah daerah, penegak hukum serta tokoh-tokoh masyarakat perlu untuk dioptimalkan guna mencegah merebaknya penyakit masyarakat dan kenakalan remaja, termasuk didalamnya pencegahan penyalahgunaan narkoba, minuman keras, tawuran, perjudian serta pelecehan seksual;

4. Meningkatkan kualitas demokrasi masyarakat.

Untuk meningkatkan kualitas demokrasi ditengah masyarakat maka perlu dilakukan optimalisasi pendidikan politik masyarakat untuk membangun etika dan moral politik serta kedewasaan perilaku berdemokrasi. Selain itu, penguatan peran partai politik dan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan juga perlu menjadi perhatian bagi pemerintah daerah.

5. Pemantapan implementasi reformasi birokrasi.

Pemantapan implementasi reformasi birokrasi, pada hakekatnya adalah upaya untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Dengan meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintah, maka diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Permasalahan yang terjadi dalam masyarakat yang menjadi pokok perhatian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya antara lain:

1. Mulai melunturnya/ menurunnya jiwa bela negara dan wawasan kebangsaan pada generasi muda yang disebabkan oleh:
 - a. Derasnya arus masuk budaya asing yang kurang sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa dan Pancasila;
 - b. Terjadinya globalisasi dan digitalisasi;
 - c. Munculnya bibit-bibit fanatisme dan radikalisme;
 - d. Masih belum optimalnya penyelenggaraan pendidikan ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa.
2. Masih tingginya kasus kenakalan remaja dan penyakit masyarakat yang disebabkan oleh:
 - a. Masih rendahnya pencegahan penyakit masyarakat;
 - b. Masih rendahnya pengawasan penyakit masyarakat;
 - c. Masih terbatasnya kemampuan dalam membatasi peredaran dan penyalahgunaan narkoba;
 - d. Masih belum optimalnya perlindungan terhadap perempuan dan anak.

3. Masih adanya potensi gangguan terhadap kerukunan umat beragama yang disebabkan oleh:
 - a. Masih rendahnya tingkat penyelenggaraan penguatan kerukunan umat beragama;
 - b. Munculnya aliran-aliran kepercayaan baru;
 - c. Belum terbentuknya Forum Komunikasi Umat Beragama.
4. Masih banyaknya potensi konflik di tengah masyarakat yang dipicu oleh:
 - a. Belum optimalnya peran tim dan forum strategis daerah dalam mencegah dan menaggani konflik;
 - b. Belum akuratnya data potensi konflik.
5. Masih rendahnya kualitas demokrasi yang disebabkan oleh:
 - a. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemberian hak suara;
 - b. Masih rendahnya pendidikan politik masyarakat;
 - c. Masih rendahnya pengawasan terhadap partai politik;
 - d. Belum optimalnya peran ormas dan LSM dalam pembangunan.

1.5 LANDASAN HUKUM

Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 disusun mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya antara lain :

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021–2026;
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 182 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2021-2026.

1.6. SISTEMATIKA PENULISAN

Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 menjelaskan pencapaian kinerja tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025. Metode evaluasi yang digunakan adalah metode sederhana dengan membandingkan antara target kinerja yang ditetapkan dengan realisasi kinerja. Analisa terhadap keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis adalah dengan mengurai penyebab keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dimaksud. Sedangkan analisis program/kegiatan menguraikan tentang efesiensi penggunaan anggaran yang tersedia dan menguraikan keterkaitan antara program dengan indikator kinerja dan target kinerja yang ditetapkan. Berdasarkan kerangka pikir tersebut, sistematika penyajian Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menjelaskan latar belakang penyusunan LKj, peran LKj dalam SAKIP, serta keterkaitannya dengan perencanaan dan penganggaran. Bersifat normatif dan umum.

1.2 Maksud dan Tujuan

Menjelaskan maksud dan tujuan penyusunan LKj sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja dan sarana evaluasi serta perbaikan kinerja.

1.3 Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Pengisian menampilkan bagan struktur organisasi dan penjelasan singkat unit kerja utama.

1.4 Aspek Strategis Organisasi dan Permasalahan Utama

Menguraikan kondisi strategis organisasi dan permasalahan utama yang mempengaruhi pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja. Disajikan secara deskriptif.

1.5 Landasan Hukum

Memuat daftar peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyusunan LKj dan pelaksanaan tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

1.6 Sistematika Penyusunan

Menjelaskan secara singkat isi Bab I sampai Bab IV serta Lampiran.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Menguraikan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang berlaku, meliputi visi, misi, tujuan, sasaran strategis, dan indikator kinerja.

2.2 Rencana Kinerja

Menjelaskan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan untuk mencapai sasaran strategis.

2.3 Perjanjian Kinerja

Memuat Perjanjian Kinerja yang ditandatangani pimpinan sebagai komitmen kinerja.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Metodologi Penilaian Capaian Target Kinerja

Pada sub bab ini disajikan klasifikasi penilaian dan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan capaian indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan.

3.2 Hasil Pengukuran Kinerja

Pada sub bab ini disajikan hasil pengukuran kinerja yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan.

3.3 Capaian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Pada sub bab ini disajikan analisa capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan.

3.4 Realisasi Keuangan

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan



BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berisikan kesimpulan umum atas capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan.

4.2 Saran

Berisikan langkah-langkah yang akan dilaksanakan di masa yang akan datang untuk peningkatan kinerja.

LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021 – 2026 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan 2021 – 2026. Dokumen perencanaan ini secara garis besar memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan yang akan dicapai Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026. Pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang tertuang dalam RPJMD, diwujudkan dengan Tujuan dan Sasaran Strategis masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

A. VISI

Visi merupakan gambaran dan harapan masa depan yang akan diraih dalam waktu yang telah ditentukan. Visi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 adalah ***Mewujudkan Pesisir Selatan Lebih Sejahtera, Maju dan Bermartabat didukung Pemerintahan Yang Akuntabel dan Profesional***. Penjabaran Visi tersebut adalah :

Sejahtera : Mengandung makna dalam lima tahun kedepan akan terjadi semakin meningkatnya kesejahteraan masyarakat, yang diindikasikan dengan meningkatnya pendapatan perkapita penduduk yang berdampak pula pada menurunnya angka kemiskinan, serta peningkatan akses pelayanan kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar.

- Maju** : Mengandung makna membangun daerah yang dilandasi keinginan bersama untuk mewujudkan masa depan ekonomi, sosial dan lingkungan fisik yang lebih baik, didukung sumberdaya manusia yang unggul, profesional, berperadapan tinggi, berdaya saing, berakhlak mulia serta berwawasan ke depan.
- Bermartabat** : Mengandung makna kondisi kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara yang bertumpu pada nilai-nilai budi pekerti dan budaya yang luhur, mengedepankan ASBK (Adat Basandi Sarak, Sarak Basandi Kitabullah)
- Akuntabel** : Mengandung makna tanggungjawab yang bersifat obyektif dan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjelaskan kinerja atas tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.
- Profesional** : Mengandung makna bahwa Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik (Partisipatif, Transparan dan Efisien) dan Bersih (bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme).

B. M I S I

Berkaitan dengan pernyataan visi pembangunan lima tahun ke depan, maka untuk **MEWUJUDKAN PESISIR SELATAN LEBIH SEJAHTERA, MAJU, DAN BERMARTABAT DIDUKUNG PEMERINTAHAN YANG AKUNTABEL DAN PROFESIONAL** dilaksanakan melalui 6 (enam) Misi yaitu :

1. Memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan.
2. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat.
3. Memperkuat kemandirian ekonomi dengan mendorong sektor potensi dan unggulan daerah.
4. Mewujudkan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai daerah tujuan wisata yang nyaman dan berkesan.
5. Mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan sumberdaya manusia yang beriman, kreatif dan berdaya saing.
6. Mewujudkan masyarakat yang aman, tentram dan dinamis.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan mendukung misi ke-6 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yaitu ***Mewujudkan Masyarakat Yang Aman, Tentram dan Dinamis*** dengan tujuan terciptanya kondisi masyarakat Pesisir Selatan yang aman tentram dan dinamis.

C. Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah, ditetapkan tujuan dan sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut ini :



Tabel 2.1. Rasionalisasi Target Kinerja (Renstra)

No	Misi	Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target kinerja tujuan/sasaran pada tahun ke					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Misi 1: Memperkuat Tatakelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Transparan	<u>Tujuan 1.</u> Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Berkinerja Tinggi	<u>Indikator tujuan 1:</u> Indeks Reformasi Birokrasi	68,42	69,92	71,42	72,92	74,42	75,95
		<u>Sasaran 1:</u> Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	<u>Indikator Sasaran 1:</u> - Nilai RB Perangkat Daerah - Nilai AKIP Perangkat Daerah	N/A	N/A	B (65)	B (65)	B (65)	B (65)
		<u>Sasaran 2 :</u> Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	<u>Indikator sasaran 2:</u> Nilai Kematangan Inovasi PD	BB (71.8)	BB (72)	A (81)	A (81.2)	A (81.5)	A (82)
2	Misi 6: Mewujudkan Kondisi Masyarakat yang Aman, Tenram dan Dinamis	<u>Tujuan 2 :</u> Terciptanya Kondisi Masyarakat Pesisir Selatan yang Aman, Tenram dan Dinamis	<u>Indikator tujuan 2:</u> Indeks Kebahagiaan Masyarakat	BB (71,8)	BB (72)	BB (72,1)	BB (72,3)	BB (72,5)	BB (73)
		<u>Sasaran 3 :</u> Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dan Menjaga Lingkungan Secara Mandiri	<u>Indikator sasaran 3:</u> - Cakupan pencegahan atau tangkal dini konflik - Cakupan Peningkatan Pendidikan wawasan kebangsaan dan Pendidikan Politik	80%	80%	80%	80%	100%	100%
				N/A	N/A	30%	30%	35%	35%

Sumber : Subbag Program, Anggaran dan Keuangan

Target kinerja tahun 2025 berbeda dengan target yang ada pada Renstra hal ini dikarenakan adanya penetapan target melalui harmonisasi dengan Bapedalitbang pada tanggal 17 Januari 2025. Maka tujuan dan sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2. Rencana Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Berkinerja Tinggi	Terwujudnya Pemerintahan Yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP Perangkat Daerah	A (82)
		Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah	91
2.	Terciptanya Kondisi Masyarakat Pesisir Selatan Yang Aman, Tentram dan Dinamis	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dan Menjaga Lingkungan Secara Mandiri	Cakupan Pencegahan atau Tangkal Dini Konflik	100%
			Cakupan Peningkatan Pendidikan Wawasan Kebangsaan dan Pendidikan Politik	60%

Sumber: Subbag Program, Anggaran dan Keuangan

2.2 RENCANA KINERJA

Dalam kerangka perencanaan pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025, merupakan Tahun ketiga pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) dan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026. Selanjutnya, RPJMD menjadi pedoman penyusunan RKPD dan dijabarkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) sebagai dokumen teknis operasional. Selanjutnya dapat dijabarkan pada Rencana Kinerja Tahunan seperti tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.3. Rencana Kinerja Tahunan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
MISI 1 : Memperkuat Tatakelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Transparan				
1	Terwujudnya Pemerintahan Yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Tanpa Satuan	A (82)
2	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah	Tanpa Satuan	91
MISI 6 : Mewujudkan Kondisi Masyarakat yang Aman, Tentram dan Dinamis				
3	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan dan menjaga lingkungan secara mandiri	Cakupan pencegahan atau tangkal dini konflik	persen	100
		Cakupan peningkatan Pendidikan wawasan Kebangsaan dan Pendidikan Politik	persen	60

Untuk menentukan sasaran strategis, IKU, dan program pendukung maka diperlukan target kinerja yang efektif, menggunakan fitur atau metode **SMART** (Specific, Measurable, Attainable, Relevant dan Time-bound atau spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan terikat waktu). Karena fitur atau metode **SMART** ini merupakan metode yang paling efektif untuk menentukan target dan dapat digunakan untuk mengidentifikasi target yang ingin dicapai dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Analisis Situasi

Pahami kondisi saat ini dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, termasuk sumber daya yang ada, tantangan, dan peluang.

2. Penetapan Tujuan

Tentukan Tujuan yang jelas untuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang akan membimbing penetapan target.

3. Tujuan Strategis

Tetapkan tujuan strategis yang ingin dicapai dalam jangka panjang.

4. Indikator Kinerja

Kembangkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang akan digunakan untuk mengukur pencapaian terhadap tujuan - tujuan tersebut.

5. Target Spesifik

Tetapkan target spesifik untuk setiap IKU yang telah ditentukan.

6. Rencana Aksi

Buat rencana aksi terperinci dengan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai target tersebut.

7. Monitoring dan Evaluasi

Lakukan monitoring secara berkala dan evaluasi pencapaian target, serta lakukan penyesuaian jika diperlukan

Selanjutnya barulah sasaran strategis, IKU, dan program pendukung dapat dijabarkan dalam tabel 2.4 berikut

Tabel 2.4. Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Program Pendukung
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULA PERHITUNGAN	SATUAN	PROGRAM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Hasil penilaian Inspektorat Daerah	Tanpa Satuan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2.	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi PD	Hasil penilaian saat pengentrian kriteria inovasi pada aplikasi IGA	Tanpa Satuan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
3.	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dan Menjaga Lingkungan	Cakupan pencegahan atau tangkal dini konflik	$\frac{\sum \text{potensi konflik yang terdeteksi, terbahas dan tertangani dalam rakor kewaspadaan dini masyarakat (KDM)}}{\sum \text{konflik yang dilaporkan}} \times 100\%$	%	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi



	Secara Mandiri				Penanganan Konflik Sosial
		Cakupan Peningkatan Pendidikan wawasan kebangsaan dan Pendidikan Politik	$\frac{\sum \text{Kelompok masyarakat yang mendapatkan Pendidikan Wawasan Kebangsaan dan Pendidikan Politik}}{\sum \text{Kelompok masyarakat Sasaran Pendidikan Wawasan Kebangsaan dan Pendidikan Politik}} \times 100\%$	%	- Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan; - Program Pembinaan dan Pengembangan; - Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya; - Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.

Sumber: Subbag Program, Anggaran dan Keuangan

2.3 PERJANJIAN KINERJA

Penyusunan perjanjian kinerja tahun 2025 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mengacu kepada sasaran strategis. Disini disajikan Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025. Secara garis besar perjanjian kinerja tahun 2025 meliputi 3 sasaran strategis, pengukuran pencapaian sejumlah sasaran tersebut dilakukan melalui indikator kinerja beserta targetnya. Berdasarkan target yang ada pada Renstra sasaran strategis, indikator kinerja dan target pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.5.a Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Pemerintahan Yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai RB Perangkat Daerah	B (65)
		Nilai AKIP Perangkat Daerah	A (81,5)
2.	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah	100
3.	Terciptanya Kondisi Masyarakat Pesisir Selatan yang Aman, Tentram dan Dinamis	Cakupan Pencegahan atau Tangkal Dini Konflik	100%
		Cakupan Peningkatan Pendidikan Wawasan Kebangsaan dan Pendidikan Politik	35%

Sumber: Subbag Program, Anggaran dan Keuangan

Berdasarkan hasil rasionalisasi target pada indikator kinerja yang telah dilaksanakan pada hari kamis tanggal 16 Januari 2025 di Bapedalitbang, maka dilakukan perubahan target pada perjanjian kinerja tahun 2025, perubahan target ini merujuk pada hasil realisasi tahun 2024. Target indikator kinerja Nilai RB Perangkat Daerah B (65) tidak lagi menjadi target OPD melainkan merupakan target Pemda Kabupaten Pesisir Selatan sehingga untuk Perjanjian Kinerja Tahun 2025 tidak dicantumkan lagi di Perjanjian Kinerja Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan. Nilai AKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik meningkat pada tahun 2024 sehingga berdasarkan hasil rasionalisasi dengan Bapedalitbang maka target kinerja pada tahun 2024 meningkat dari yang semula 81.2 pada renstra menjadi 82. Nilai kematangan inovasi disepakati dilebihkan 2 point dari capaian nilai kematangan inovasi di aplikasi IGA. Tahun 2024 capaian nilai kematangan inovasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 89 sehingga untuk target tahun 2025 menjadi 91. Untuk target indikator kinerja Cakupan Peningkatan Pendidikan Wawasan Kebangsaan dan Pendidikan Politik berubah dari target pada Renstra 35% melalui harmonisasi didapatkan target pada perjanjian kinerja tahun 2025 menjadi 60%, hal ini dikarenakan capaian kinerja untuk indikator Cakupan Peningkatan Pendidikan Wawasan Kebangsaan dan Pendidikan Politik pada tahun 2024 melebihi target kinerja, maka perjanjian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.5.b Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 (Hasil Rasionalisasi)

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Pemerintahan Yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP Perangkat Daerah	A (82)
2.	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah	91
3.	Terciptanya Kondisi Masyarakat Pesisir Selatan yang Aman, Tentram dan Dinamis	Cakupan Pencegahan atau Tangkal Dini Konflik	100%
		Cakupan Peningkatan Pendidikan Wawasan Kebangsaan dan Pendidikan Politik	60%

Sumber: Subbag Program, Anggaran dan Keuangan

Perjanjian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memiliki 3 (tiga) sasaran strategis dengan 4 (empat) indikator kinerja, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sasaran strategis I “Terwujudnya Pemerintahan Yang Akuntabel dan Berkinerja” dengan indikator kinerja “Nilai Akip Perangkat Daerah” dengan target “A (82)”.
2. Sasaran Strategis II “Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah” dengan indikator kinerja “Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah” dengan target “91”.
3. Sasaran Strategis III “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi” dengan 2 (dua) indikator kinerja, yaitu: 1) Cakupan Pencegahan atau Tangkal Dini Konflik (target: 100%), 2) Cakupan Peningkatan Pendidikan Wawasan Kebangsaan dan Pendidikan Politik (target: 60%).

Di bawah ini merupakan tabel program, indikator kinerja target serta anggaran pada perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025.

Tabel 2.6. Program dan Anggaran pada Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025

No.	Program	Indikator Kinerja	Target	Anggaran (Rp)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai AKIP Perangkat Daerah	A (82)	Rp3.142.575.453,-
2.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah	91	Rp2.000.000,-
3.	- Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan; - Program Pembinaan dan Pengembangan; - Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya; - Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.	Cakupan Pencegahan atau Tangkal Dini Konflik	100%	257.977.500,-
		Cakupan Peningkatan Pendidikan Wawasan Kebangsaan dan Pendidikan Politik	60%	2.017.797.882,-

Sumber: Subbag Program, Anggaran dan Keuangan

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka mencapai misi pemerintah daerah secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025. Akuntabilitas kinerja ini mencakup 3 (tiga) sasaran strategis dengan 4 (empat) indikator kinerja.

3.1 METODOLOGI PENILAIAN CAPAIAN TARGET KINERJA

Penilaian Kinerja yang dilakukan adalah pengukuran capaian target kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025. Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah metode pengukuran sederhana dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis. Hasil pengukuran dan capaian indikator kinerja dimaksud, digunakan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan serta analisis penyebab keberhasilan/kegagalan capaian target indikator kinerja yang ditetapkan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis diukur dengan capaian kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang berkenaan.

Ada dua jenis pengukuran capaian kinerja yang dapat digunakan yaitu :

1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tinggi kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah, atau sebaliknya jika realisasi makin rendah pencapaian kinerja semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{(2 \times \text{Target}) - \text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Untuk penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan keberhasilan/kegagalan capaian indikator kinerja, ditetapkan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan sebagaimana tercantum pada tabel 3.1 dibawah ini :

Tabel 3.1. Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2025

No	Klasifikasi Penilaian	Predikat
1	85% - 100%	Sangat Baik
2	69% - 84%	Baik
3	53% - 68%	Cukup
4	< 53%	Gagal

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

3.2 HASIL PENGUKURAN KINERJA

Hasil pengukuran capaian target indikator kinerja 3 (tiga) sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada Tabel 3.2. di bawah ini.

Tabel 3.2. Hasil Pengukuran Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025

Misi/ Tujuan /Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
Misi 1 : Memperkuat Tatakelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Transparan Tujuan 1 : Terwujudnya Reformasi Birokrasi Yang Berkinerja Tinggi					
(1).Terwujudnya Pemerintahan Yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Tanpa satuan	A (82)	A (81,97)	99.96
(2).Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah	Tanpa satuan	91	68	75
Misi 6 :Mewujudkan Kondisi Masyarakat Yang Aman, Tentram dan Dinamis Tujuan 2: Terciptanya Kondisi Masyarakat Pesisir Selatan yang Aman, Tentram dan Dinamis					
(3). Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan dan Menjaga Lingkungan Secara Mandiri	Cakupan Pencegahan atau tangkal dini konflik	Persen	100	100	100
	Cakupan Peningkatan Pendidikan Wawasan Kebangsaan dan Pendidikan Politik	Persen	60	69	115
Rata rata Capaian					97.42

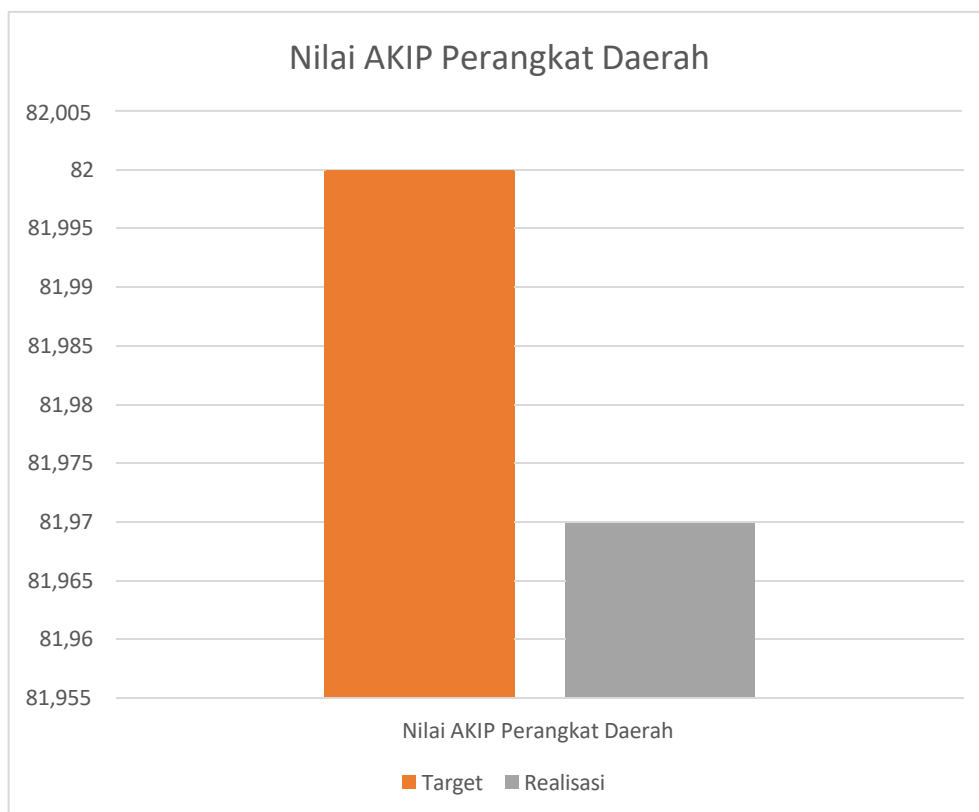
*) Penilaian LKj Tahun 2024

Sumber : Sub Bagian Program, Anggaran dan Keuangan

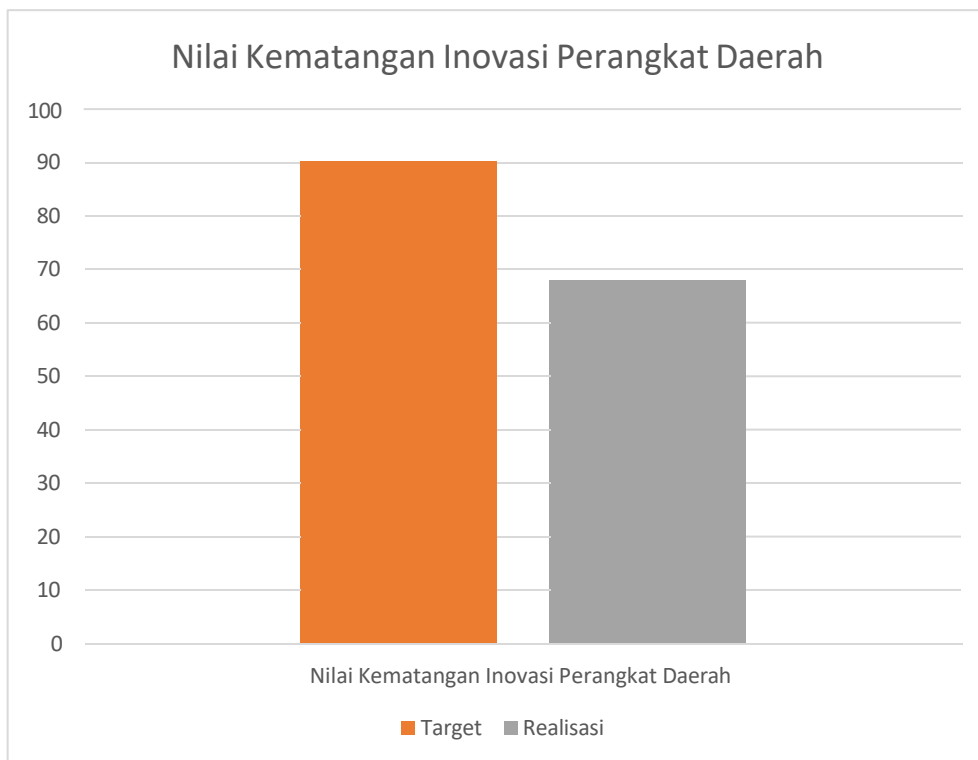
Dari tabel di atas dapat dilihat ada 4 (empat) indikator dan target kinerja perjanjian kinerja tahun 2025 berbeda dengan target pada Renstra hal ini dikarenakan adanya penetapan target melalui harmonisasi dengan Bapedalitbang. Target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yaitu **(1)** Nilai AKIP Perangkat Daerah dengan target A (82) dengan realisasi tahun 2024 A (82) dengan tingkat capaian 99.96% **(2)**. Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah dengan target 91 dan terealisasi 68 dengan tingkat capaian 75% **(3)**. Cakupan pencegahan atau tangkal dini konflik dengan target 100% dan terealisasi 100% dengan tingkat capaian 100% **(4)**. Cakupan peningkatan Pendidikan Wawasan Kebangsaan dan pendidikan politik dengan target 60% dan teralisasi 69% dengan tingkat capaian 115%. Berdasarkan penilaian dan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis

dan capaian indikator kinerja berdasarkan Permendagri nomor 86 tahun 2017 maka untuk capaian indikator Nilai AKIP Perangkat Daerah dengan nilai A (82) atau sebesar 99.96% dengan **memuaskan**. Capaian indikator Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah dengan nilai 68 atau sebesar 75% dengan **predikat sangat inovatif** (kategori nilai kematangan inovasi pada aplikasi IGA). Cakupan pencegahan atau tangkal dini konflik dengan realisasi 100% atau sebesar 100% dengan **predikat sangat baik**. Cakupan peningkatan Pendidikan Wawasan Kebangsaan dan pendidikan politik dengan realisasi 69% atau sebesar 115% dengan **predikat sangat baik**. Rata rata capaian kinerja 4 (empat) indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2025 adalah **97.42** dengan **predikat sangat baik**. Berikut capaian kinerja per indikator dapat diinterpretasikan pada grafik di bawah ini:

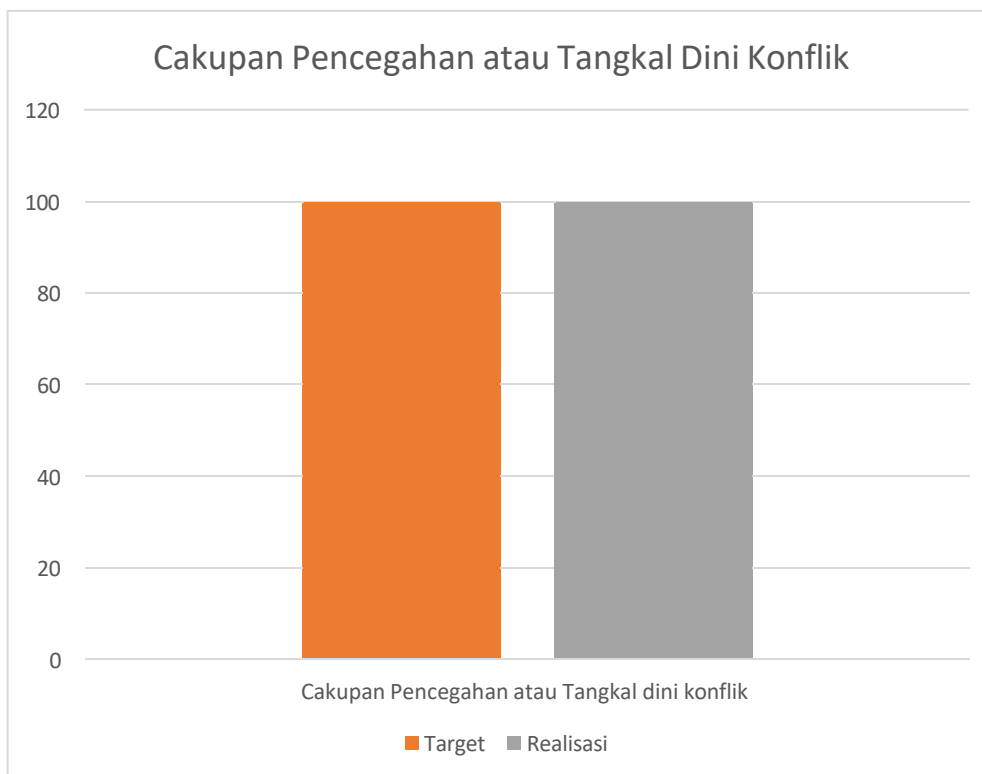
Grafik 3.1 Capaian Kinerja Nilai AKIP Perangkat Daerah



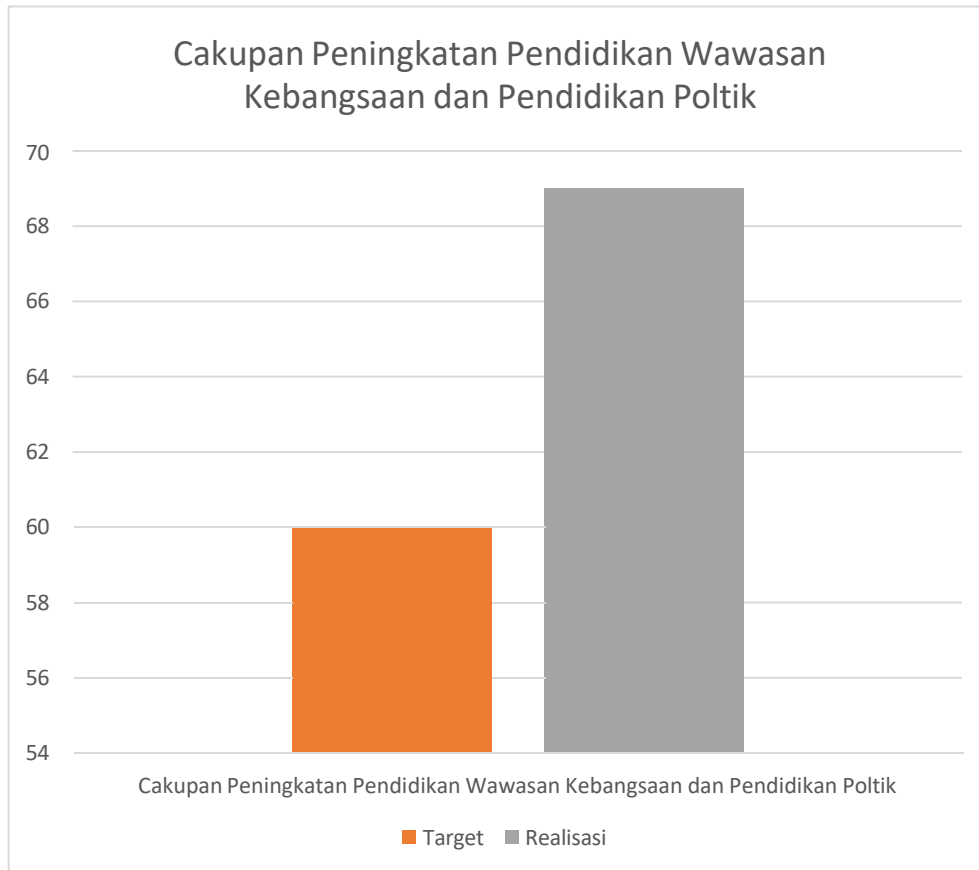
Grafik 3.2 Capaian Kinerja Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah



Grafik 3.3 Capaian Kinerja Cakupan Pencegahan atau Tangkal dini konflik



Grafik 3.4 Capaian Cakupan Peningkatan Pendidikan Wawasan Kebangsaan dan Pendidikan Poltik



3.3 CAPAIAN KINERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Pada tahun 2025 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melaksanakan Misi 1 dan Misi 6 dengan 3 (tiga) sasaran dan 4 (empat) indikator. Untuk lebih jelasnya berikut disampaikan capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2025.

Sasaran 1: Terwujudnya Pemerintahan Yang Akuntabel dan Berkinerja

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja terdiri atas 1 (satu) indikator kinerja yaitu Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan.

1. Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Perbandingan antara terget dan realisasi kinerja Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 3.3 di bawah ini:

Tabel 3.3. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1

No.	Indikator Kinerja	Satuan	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1.	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Tanpa Satuan	A (82)	*A (81.97)	99.96
Rata- Rata Capaian					99.96

Sumber : Nilai AKIP tahun 2024 Subbag Program, Anggaran dan Keuangan

Sasaran strategis (1) **Terwujudnya Pemerintahan Yang Akuntabel dan Berkinerja** merupakan tahapan yang dilakukan untuk mewujudkan reformasi birokrasi di setiap organisasi pemerintah dan bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sasaran **Terwujudnya Pemerintahan Yang Akuntabel dan Berkinerja** adalah dalam rangka pencapaian tujuan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

Tata kelola pemerintahan yang baik mengandung prinsip efektif dan efisien terhadap pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis meningkatnya tata kelola organisasi ini ditetapkan indikator kinerja (1) **Nilai AKIP**

Perangkat Daerah yang mana adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan. Dari tabel 12 dapat dilihat target indikator kinerja nilai evaluasi akuntabilitas kinerja adalah A (82) dengan realisasi A (81.97) maka tingkat capaiannya **99.96%**. Dengan demikian, capaian indikator kinerja ini termasuk kategori kinerja “**sangat memuaskan**”. Keberhasilan sasaran 1 didukung oleh 1 (satu) Program dengan 5 (lima) Kegiatan dengan 14 (empat belas) sub kegiatan yaitu :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

3. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor
- b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- e. Fasilitas Kunjungan Tamu
- f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
- b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- b. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
- c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

2. Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Perbandingan capaian Indikator Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan Tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 3.4 dibawah ini :



Tabel 3.4. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis I Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target					Realisasi					Capaian (%)				
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
Terwujudnya Pemerintahan Yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP Perangkat Daerah	BB (71,8)	BB (72)	A (81)	A (81,2)	A (82)	BB (77.14)	A (80.26)	A (81.9)	A (81.97)	*A (81.97)	107.13	99.09	100.86	99.96	*99.96

*) Penilaian LKj Tahun 2024

Sumber : Subbag Program, Anggaran dan Keuangan

Secara grafik 3.5 perbandingan antara target dan realisasi indikator kinerja Nilai AKIP Perangkat Daerah Tahun 2021 s/d 2025 disajikan pada grafik di bawah ini :



Sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, pelaksanaan akuntabilitas kinerja diharuskan bagi setiap instansi pemerintah. Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai visi dan misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara revidi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dijelaskan lebih lanjut tentang laporan Kinerja yang merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Laporan kinerja tersebut selanjutnya dievaluasi oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dari tahun 2021 dengan nilai **77.14 (BB)** dengan predikat **“sangat baik”** mengalami kenaikan menjadi **80.26 (A)** di tahun 2022 dengan predikat **“memuaskan”**, di tahun 2023 nilai evaluasi akuntabilitas kinerja meningkat menjadi **81.9 (A)** dengan predikat **“memuaskan”**, di tahun 2024 nilai evaluasi akuntabilitas kinerja meningkat menjadi **81.97 (A)** dengan predikat **“memuaskan”**. Hal ini menunjukkan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan yang berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai level eselon 4/pengawas/subkoordinator. Evaluasi atas Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di laksanakan terhadap 4 (empat) komponen dasar manajemen kinerja yaitu (1) perencanaan kinerja (2) pengukuran kinerja (3) pelaporan kinerja (4) evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

Dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya peningkatan nilai AKIP terjadi karena peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan telah mengupayakan hal-hal berikut ini :

- a. Menyusun dan mempublikasikan semua dokumen perencanaan kinerja diantaranya Renstra, IKU, Renja, RKT, PK, Rencana Aksi dan Perencanaan Anggaran (DPA).
- b. Melakukan pengukuran Kinerja secara berkala dengan melibatkan pimpinan.
- c. Menyusun laporan kinerja tepat waktu dengan mempedomani aturan yang berlaku.
- d. Melakukan pemantauan capaian kinerja secara berkala melalui rapat-rapat monitoring dan evaluasi dengan mengacu pada SOP yang ditetapkan.

3. Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Dalam penetapan target pada Renstra dan Perjanjian Kinerja, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik beserta Tim Bapadalitbang menyepakati target yang akan dicapai oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan mempedomani Rasionalisasi RPJMD, Renstra dan target capaian tahun sebelumnya, maka didapatkan target rasionalisasi Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik seperti tabel 3.5 di bawah ini:

Tabel 3.5. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis I dengan Target dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun 2025	Target Kinerja Tahun 2025 pada Renstra	Keterangan
1.	Terwujudnya Pemerintahan Yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP Perangkat Daerah	*A (81.97)	A (82)	* Merupakan Nilai AKIP 2024 Untuk Nilai AKIP 2025 masih dalam proses

*) Penilaian LKj Tahun 2024

Sumber : Subbag Program, Anggaran dan Keuangan

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa realisasi kinerja pada sasaran I dengan indikator kinerja **Nilai AKIP Perangkat Daerah** melebihi target dengan capaian kinerja 99.96%, nilai AKIP yang disajikan merupakan nilai AKIP tahun 2024 karena nilai AKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2025 belum bisa kami sampaikan karena nilai LKj baru bisa didapat sekitar bulan Maret setelah laporan ini kami sampaikan ke Inspektorat Daerah.

Berdasarkan kajian rasionalisasi target Resntra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan 2021-2026 maka target tahun 2025, penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah 82 (A). Nilai AKIP Badan Kesatuan Bangsa dan politik Pesisir Selatan Tahun 2025 masih dalam proses evaluasi oleh inspektorat, maka berdasarkan hasil AKIP tahun 2024 nilai AKIP Badan Kesatuan Bangsa adalah 81,97 (A) artinya nilai ini sudah mendekati target rasionalisasi Resntra yaitu 82 (A) dengan capaiannya adalah 99.96%.

4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Standar Provinsi dan Nasional

Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negeri dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penilaian terhadap Sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah terbagi atas 7 kategori yaitu AA (>90-100), A (>80-90), BB (>70-80), B (>60-70), CC (>50-60), C (>30-50), dan D (>0-30) sebagaimana disajikan pada tabel 3.6 berikut :

Tabel 3.6. 7 Kategori Penilaian Terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Sasaran Strategis I Instansi Pemerintah

No.	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1.	AA	>90-100	Sangat Memuaskan
2.	A	>80-90	Memuaskan , Memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel
3.	BB	>70-80	Sangat Baik , Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja andal
4.	B	>60-70	Baik , Akuntabilitas kinerja sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan
5.	CC	>50-60	Cukup (Memadai) , kuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar
6.	C	>30-50	Kurang , Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar
7.	D	>0-30	Sangat Kurang , Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja, perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar

Sumber: Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negeri dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015

Jika dibandingkan dengan standar nasional, nilai evaluasi laporan akuntabilitas kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2024 memperoleh nilai A (>80-90). Dengan kata lain, nilai evaluasi akuntabilitas kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat dikategorikan **memuaskan** artinya memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel.

Benchmarking adalah proses membandingkan kinerja atau hasil suatu wilayah dengan wilayah lain. Benchmarking dapat dilakukan antar provinsi atau antar wilayah yang lebih dari satu. Di bawah ini adalah tabel perbandingan nilai AKIP Kabupaten Pesisir Selatan dengan beberapa wilayah lain:

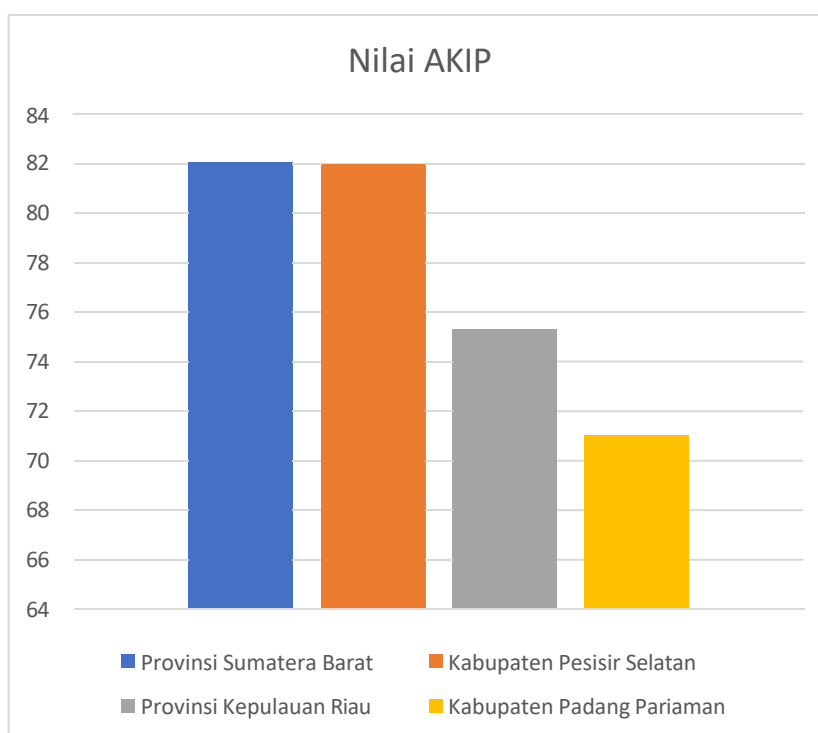
Tabel 3.7. Benchmarking Nilai AKIP Kabupaten Pesisir Selatan dengan Kabupaten/Kota Lain

No.	Kabupaten/ Kota	Nilai AKIP	Kategori
1.	Provinsi Sumatera Barat	A (82.05)	Memuaskan
2.	Kabupaten Pesisir Selatan	*A (81,97)	Memuaskan
3.	Provinsi Kepulauan Riau	*BB (75.30)	Sangat Baik
4.	Kabupaten Padang Pariaman	*BB (71.05)	Sangat Baik

*) Penilaian LKj Tahun 2024

Sumber : Subbag Program, Anggaran dan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat,
https://padangpariamankab.go.id/frontend/assets/regulasi/15.%20Dokumen_LAKIP-2024.pdf dan <https://kesbangpol.kepriprov.go.id/wp-content/uploads/2025/05/LKjIP-Kesbangpol-2024.pdf>

Benchmarking AKIP Kabupaten Pesisir Selatan dengan Kabupaten/Kota Lain dapat diterjemahkan pada grafik 3.6 berikut:



5. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah dilakukan

Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan pada indikator kinerja nilai akuntabilitas instansi pemerintah adalah sebagai berikut:

a. Perencanaan Kinerja

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan telah membuat dan menyusun dokumen perencanaan kinerja yang terdiri atas:

- 1) Perencanaan Kinerja Jangka Menengah, yaitu Rencana Strategis (Renstra) dan Indikator Kinerja Utama (IKU);
- 2) Perencanaan Kinerja Tahunan, yaitu Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK);
- 3) Perencanaan aktivitas pendukung kinerja, yaitu Rencana Aksi (Renaksi); dan
- 4) Perencanaan Anggaran, yaitu Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Semua dokumen perencanaan kinerja ini sudah disusun dan diupload pada website Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan yaitu kesbangpol.pesisirselatankab.go.id dengan tampilan sebagai berikut :



Gambar 3.1. Upload Dokumen Perencanaan Kinerja di Website Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan



Gambar 3. Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025

b. Pengukuran Kinerja

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan sudah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis operasional organisasi.

Setelah melakukan evaluasi bersama Bapedalitbang mengenai capaian RKPD triwulan IV pada tanggal 23 Januari 2026 maka didapatkan nilai RKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sampai dengan tahun 2025 adalah 93.66% dengan predikat **“sangat tinggi”**. Dan juga untuk perhitungan capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025 mendapatkan nilai 97.42% dengan predikat **“sangat baik”**. Capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat dilihat pada tabel 3.8 di bawah ini:

Tabel 3.8. Capaian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi	Capaian (%)	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP Perangkat Daerah	A (82)	A (81,97)	99,96	Program Penguatan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.062.166.171	3.097.626.878	98,22	
2.	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi PD	91	88	75	Program Penguatan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.000.000	2.000.000	100,00	
3.	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dan Merogot Lingkungan Secara Mandiri	Cakupan Pencegahan atau Tangkal Dini Konflik	100 %	100 %	100	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	257.977.500	105.889.960	41,05	
		Cakupan Peningkatan Pendidikan Wawasan Kebangsaan dan Pendidikan Politik	69 %	69 %	115	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kelangkaan	806.345.468	775.222.807	96,14	
						Program Pendidikan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya				
						Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	1.176.536.414	1.101.536.414	93,63	
						Program Pemberdayaan dan Penguatan Organisasi Masyarakat	34.916.000	34.905.925	99,99	
Total					97,42		5.339.941.553	5.077.181.184	94,14	

Sumber : Subbag Program, Anggaran dan Keuangan

c. Pelaporan Kinerja

Untuk mengoptimalkan penyusunan laporan kinerja dan menyamakan sistematisa penulisan laporan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah melakukan asistensi penyusunan laporan kinerja dengan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah. Setelah laporan kinerja disusun sesuai dengan sistematisa penulisan, selanjutnya laporan kinerja direview oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Dokumentasi dapat dilihat pada gambar 5 di bawah ini.



Gambar 3.3. Asistensi Penyusunan Laporan Kinerja dengan Bagian Organisasi



Gambar 3.4. Dokumen LKj dan Laporan Hasil Evaluasi LKj Tahun 2024

d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan sudah melakukan rapat evaluasi kinerja triwulan I, II, III dan IV tahun 2025. Evaluasi kinerja didukung oleh dokumentasi sebagai berikut:





Gambar 3.5. Dokumentasi Rapat Evaluasi Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan

Setelah dilakukan rapat evaluasi kinerja triwulan I tahun 2025, maka dapat disimpulkan capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada triwulan I tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- a. Sasaran I: Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja, dengan indikator: Nilai AKIP Perangkat Daerah. Dari sasaran I didapatkan nilai capaian kinerja A (81,97). Maka capaian kinerja sasaran I untuk triwulan I adalah 99.96%.
- b. Sasaran II: Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah, dengan indikator: Nilai Kematangan Inovasi PD. Dari sasaran II didapatkan nilai capaian kinerja 0. Maka capaian kinerja

sasaran II untuk triwulan I adalah 0%. Kesbangpol Belum dapat Melaksanakan Pengentrian IGA, karena Aplikasi IGA Belum di Buka.

c. Sasaran III: Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dan Menjaga Lingkungan Secara Mandiri, dengan indikator:

- 1) Cakupan Pencegahan atau Tangkal Dini Konflik. Dari sasaran III indikator I didapatkan nilai capaian kinerja 0%. Maka capaian kinerja sasaran III indikator I untuk triwulan I adalah 0%.
- 2) Cakupan Peningkatan Pendidikan Wawasan Kebangsaan dan Pendidikan Politik. Dari sasaran III indikator I didapatkan nilai capaian kinerja 0%. Maka capaian kinerja sasaran III indikator II untuk triwulan I adalah 0%.

Setelah dilakukan rapat evaluasi kinerja triwulan II tahun 2025, maka dapat disimpulkan capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada triwulan II tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- a. Sasaran I: Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja, dengan indikator: Nilai AKIP Perangkat Daerah. Dari sasaran I didapatkan nilai capaian kinerja A (81,97). Maka capaian kinerja sasaran I untuk triwulan II adalah 99.96%.
- b. Sasaran II: Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah, dengan indikator: Nilai Kematangan Inovasi PD. Dari sasaran II didapatkan nilai capaian kinerja 0. Maka capaian kinerja sasaran II untuk triwulan II adalah 0%.
- c. Sasaran III: Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dan Menjaga Lingkungan Secara Mandiri, dengan indikator:
 - 1) Cakupan Pencegahan atau Tangkal Dini Konflik. Dari sasaran III indikator I didapatkan nilai capaian kinerja 100%. Maka capaian kinerja sasaran III indikator I untuk triwulan II adalah 100%.
 - 2) Cakupan Peningkatan Pendidikan Wawasan Kebangsaan dan Pendidikan Politik. Dari sasaran III indikator I didapatkan nilai capaian kinerja 0%. Maka capaian kinerja sasaran III indikator II untuk triwulan II adalah 0%.

Setelah dilakukan rapat evaluasi kinerja triwulan III tahun 2025, maka dapat disimpulkan capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada triwulan III tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- a. Sasaran I: Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja, dengan indikator: Nilai AKIP Perangkat Daerah. Dari sasaran I didapatkan nilai capaian kinerja A (81,97). Maka capaian kinerja sasaran I untuk triwulan III adalah 99,96%.
- b. Sasaran II: Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah, dengan indikator: Nilai Kematangan Inovasi PD. Dari sasaran II didapatkan nilai capaian kinerja 68. Maka capaian kinerja sasaran II untuk triwulan III adalah 75%.
- c. Sasaran III: Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dan Menjaga Lingkungan Secara Mandiri, dengan indikator:
 - 1) Cakupan Pencegahan atau Tangkal Dini Konflik. Dari sasaran III indikator I didapatkan nilai capaian kinerja 100%. Maka capaian kinerja sasaran III indikator I untuk triwulan III adalah 100%.
 - 2) Cakupan Peningkatan Pendidikan Wawasan Kebangsaan dan Pendidikan Politik. Dari sasaran III indikator I didapatkan nilai capaian kinerja 27%. Maka capaian kinerja sasaran III indikator II untuk triwulan II adalah 45%.

Setelah dilakukan rapat evaluasi kinerja triwulan IV tahun 2024, maka dapat disimpulkan capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada triwulan IV tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- a. Sasaran I: Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja, dengan indikator: Nilai AKIP Perangkat Daerah. Dari sasaran I didapatkan nilai capaian kinerja A (81,97). Maka capaian kinerja sasaran I untuk triwulan IV adalah 99,96%.
- b. Sasaran II: Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah, dengan indikator: Nilai Kematangan Inovasi PD. Dari sasaran II didapatkan nilai capaian kinerja 68. Maka capaian kinerja sasaran II untuk triwulan IV adalah 75%.

c. Sasaran III: Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dan Menjaga Lingkungan Secara Mandiri, dengan indikator:

- 1) Cakupan Pencegahan atau Tangkal Dini Konflik. Dari sasaran III indikator I didapatkan nilai capaian kinerja 100%. Maka capaian kinerja sasaran III indikator I untuk triwulan IV adalah 100%.
- 2) Cakupan Peningkatan Pendidikan Wawasan Kebangsaan dan Pendidikan Politik. Dari sasaran III indikator I didapatkan nilai capaian kinerja 69%. Maka capaian kinerja sasaran III indikator II untuk triwulan IV adalah 115%.

Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kami bagikan di media sosial dan Website Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kabupaten Pesisir Selatan sebagai berikut:

1. Instagram



Gambar 3.6. Instagram Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan



2. Youtube



Gambar 3.7. Youtube Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan

3. Website



Gambar 3.8. Website Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk sasaran Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja, Badan Kesatua Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan melaksanakan 1 Program dengan 5 kegiatan. Anggaran untuk melaksanakan program dan kegiatan tersebut berasal dari

APBD-P Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 sebesar Rp 3.062.166.171,- Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sudah sesuai dengan efektif mencapai sasaran Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja. Rincian anggaran dan realisasi anggaran pendukung sasaran I dapat dilihat pada tabel 3.9 berikut:

Tabel 3.9. Anggaran dan Realisasi Anggran Program Pendukung Sasaran Strategis I

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi	Capaian (%)	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP Perangkat Daerah	A (82)	A (81,97)	99.96	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.062.166.171	3.007.626.878	98.22

*) Penilaian LKj Tahun 2024

Sumber : Subbag Program, Anggaran dan Keuangan

Dari jumlah anggaran sebesar Rp3.062.166.171,- terealisasi sebesar Rp3.007.626.878,- atau 98.22%. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran I terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp54.539293,- (1.78%).

Tingkat efisiensi sasaran I Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 214/PMK.02/2017 sebagai berikut:

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(PA \times CK) - RA}{(PA \times CK)} \times 100\%$$

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(3.062.166.171 \times 99.96\%) - 3.007.626.878}{(3.062.166.171 \times 99.96\%)} \times 100\%$$

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{3.060.941.304,5 - 3.007.626.878}{3.060.941.304,5} \times 100\%$$

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{53.314.426,5}{3.060.941.304,5} \times 100\%$$

$$\text{Tingkat Efisiensi} = 1.74\%$$

$$\text{Nilai Efisiensi} = 50\% + \frac{\text{tingkat efisiensi}}{20} \times 50$$

$$\text{Nilai Efisiensi} = 50\% + \frac{1.74\%}{20} \times 50$$

$$\text{Nilai Efisiensi} = 50\% + 4.35\%$$

$$\text{Nilai Efisiensi} = 54.35\%$$

Jadi nilai efisiensi pada sasaran I adalah 54.35%

Tabel 3.10. Kondisi Sumber Daya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan

Kondisi Ideal	Kondisi saat ini	Kekurangan/Kelebihan	Tindak lanjut
Jumlah ideal SDM yang sesuai dengan anjab 36 ASN	Saat ini kondisi SDM Badan Kesbangpol jumlah 23 personil dengan latar belakang pendidikan yg bervariasi	Masih di butuhkan sekitar 13 orang yang mempunyai kelas jabatan serta persyaratan jabatan yang sesuai	Mengisi kekurangan jabatan yang ada dengan mengangkat tenaga teknis yang kompeten agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan
Sumber dana yang dapat menuntaskan semua permasalahan dan memfasilitasi konflik, monitoring dan pemberdayaan ormas serta pemantauan terhadap warga negara asing.	Saat ini sumber dana belum dapat mencukupi untuk kebutuhan operasional Badan Kesbangpol terutama operasional untuk penanganan konflik yang terjadi, monitoring ormas dan pemantauan	Masih membutuhkan sumber dana/anggaran yang dapat mendukung tujuan dan sasaran dari Badan Kesbangpol	Mengajukan permintaan dana aspirasi dari anggota dewan baik kabupaten dan propinsi serta berkoordinasi dengan Kantor Imigrasi Klas I Padang

	terhadap warga negara asing yang ada di Pesisir Selatan		
Tercukupinya sarana dan prasarana kerja untuk mendukung operasional baik di kantor maupun di lapangan	Sarana dan prasarana yang ada saat sekarang belum mampu mendukung terlaksananya kegiatan baik di kantor maupun lapangan	Masih membutuhkan baik alat (komputer, printer), kendaraan dinas untuk meninjau situasi konflik sampai ke pelosok kecamatan dan pemantauan terhadap warga negara asing yang ada di Pesisir Selatan	Mengajukan/usulan pengadaan alat pendukung operasional kantor

7. Analisis Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Tujuan dan sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat tercapai melalui pencapaian program dan di dukung oleh kegiatan yang dilaksanakan di tahun 2025 melalui output dari kegiatan tersebut. Adapun capaian program dan kegiatan yang tercantum dalam rencana aksi sasaran strategis I tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 3.11. Capaian Program dan Kegiatan Sasaran Strategis Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program dan Kegiatan	Indikator Program	Target	Realisasi
1.	Terwujudnya Pemerintahan Yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100%	100%

Sumber: Subbag Program, Anggaran dan Keuangan

Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Inovasi Perangkat Daerah

Sasaran strategis (2) Meningkatnya Kualitas Inovasi Perangkat Daerah dengan indikator kinerja Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah target 91.

1. Membandingkan anantara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Tabel 3.12. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis II

No.	Indikator Kinerja	Satuan	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1.	Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah	Tanpa Satuan	91	68	75
Rata- Rata Capaian (%)					75

Sumber : Subbag Program, Anggaran dan Keuangan

Sasaran strategis (2) Meningkatnya Kualitas Inovasi Perangkat Daerah dengan indikator kinerja Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah target 91 dan terealisasi 68 pada aplikasi IGA maka tingkat capaian 75%. Dengan demikian, capaian indikator kinerja ini termasuk kategori kinerja **“sangat inovatif”**. Inovasi Sistem Usulan Cuti Pegawai (SiUCuP) yang merupakan inovasi lanjutan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. **Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah** merupakan tingkat kematangan inovasi yang menunjukkan seberapa efektifnya upaya inovasi tersebut pada suatu perangkat daerah. SiUCuP merupakan sarana untuk mempermudah serta mempersingkat pembuatan Surat Cuti Pegawai melalui pengisian sendiri (Self Services) pada google form yang telah disediakan. Beberapa dokumentasi dari Inovasi SiUCuP seperti gambar berikut ini :





Pertanyaan Jawaban **3** Setelan

Nama Pegawai
3 jawaban

YENI HENDRIA,S.H.
DALI USMAN,S.S.
DARMAWIS,Pd

Nomor Induk Pegawai (NIP)
3 jawaban

197007211993032003
198312302007011001
197109061996031003

Jabatan
3 jawaban

ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN
KEPALA BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK

Unit Kerja
3 jawaban

[Salin diagram](#)

Gambar 3.9. Google Drive SiUCuP

Dashboard Indeks Inovasi Daerah

Semua Inisiasi Uji Coba Penerapan

Kabupaten Pesisir Selatan
iga2022.kesbangpol.kabupaten.pesisir.selatan

Bentuk Inovasi: Jenis Urusan: Inisiator:

#	Nama Penda	Nama Akut	Nama Inovasi	Tahapan Inovasi	Nama Inisiator	Koordinat	Urusan Pemerintahan Utama	Waktu Penerapan Inovasi Daerah	Waktu Pengembangan Inovasi Daerah	Estimasi Skor Kematangan	Aksi
1	Kabupaten Pesisir Selatan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	SiUCuP	Penerapan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-1,34769889050404300 100 58038938024245	Kepengawasan	10/05/2024	-	88.00	

Gambar 3.10. Nilai kematangan Inovasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada aplikasi IGA



2. Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Perbandingan capaian Indikator Kinerja Nilai Kematangan Inovasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan Tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 3.13 dibawah ini :

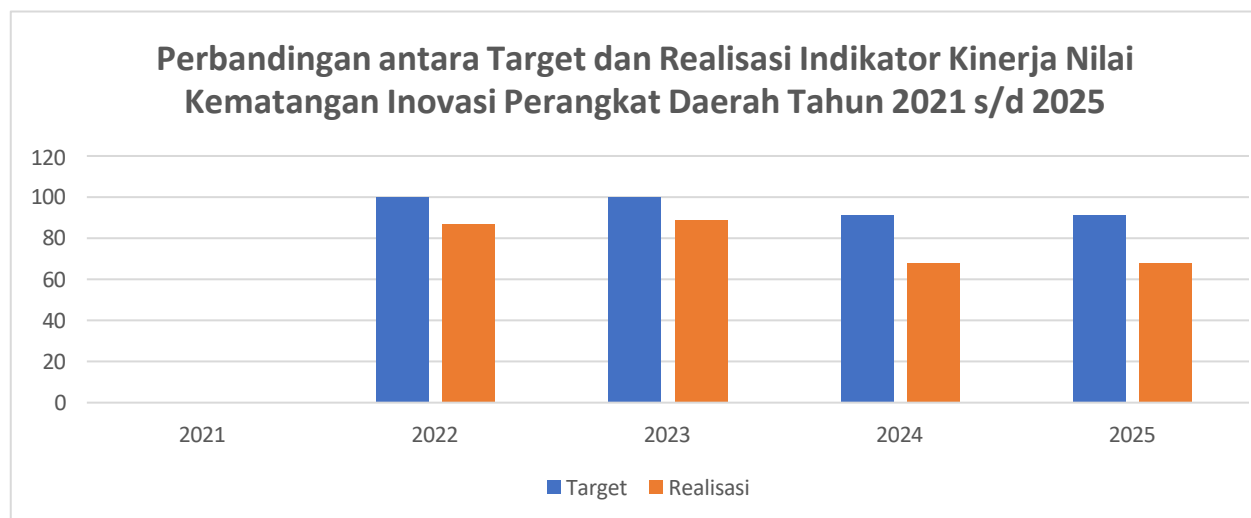
Tabel 3.13. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Sasaran Satrategis II Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target					Realisasi					Capaian (%)				
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi PD	-	100	100	91	91	-	87	89	68	*68	-	87	89	75	*75

*) Penilaian Inovasi Tahun 2024 pada aplikasi Innovative Government Award (IGA)

Sumber : Subbag Program, Anggaran dan Keuangan

Secara grafik perbandingan antara target dan realisasi indikator kinerja Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah Tahun 2021 s/d 2025 disajikan pada grafik 3.7 di bawah ini :



Dari tabel dan grafik di atas, di tahun 2021 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan masa peralihan dari bagian pada Sekretariat Daerah menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sehingga untuk inovasi masih belum ada dan belum terlaksana. Pelaksanaan inovasi mulai terlaksana di tahun 2022 dengan nama inovasinya adalah Sistem Informasi Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Pesisir Selatan (SiMANTAP PESSEL) dengan nilai tingkat kematangan inovasi 87 dengan predikat **“sangat inovatif”**. Inovasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2023 adalah Elektronik Rekomendasi Penelitian (e-Rekomplit), nilai kematangan inovasi untuk tahun ini adalah 2023 adalah 89 dengan predikat **“sangat inovatif”**. Inovasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2024 adalah Sistem Usulan Cuti Pegawai (SiUCuP), nilai kematangan inovasi untuk tahun ini adalah 2024 adalah 68 dengan predikat **“sangat inovatif”**. Untuk Nilai kematangan Inovasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025 pada tabel 3.13 realisasi dan capaiannya masih merujuk pada kematangan inovasi tahun 2024 karena proses penginputan dan penilaian kematangan inovasi pada aplikasi Innovative Government Award (IGA) akan dibuka pada bulan juli 2026.

3. Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Dalam penetapan target pada Renstra dan Perjanjian Kinerja, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik beserta Tim Bapadalitbang menyepakati target yang akan dicapai oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan mempedomani Rasionalisasi RPJMD, Renstra dan target capaian tahun sebelumnya, maka didapatkan target rasionalisasi Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik seperti tabel 3.14 di bawah ini:

Tabel 3.14. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis II dengan Target dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun 2025	Target Kinerja Tahun 2025 pada Renstra	Keterangan
1.	Sasaran II : Meningkatnya kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah	68	91	

*) Penilaian dan Pelaporan pada Aplikasi IGA Tahun 2024
Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian

Untuk sasaran II dengan indikator kinerja **Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah** dengan tingkat kematangan yang diperoleh 68 dari yang targetkan di tahun 2025 sebesar 91 tidak dapat tercapai, karena ada beberapa bahan yang diupload pada aplikasi IGA masih belum lengkap.

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Tahun 2024 membuat pedoman pengukuran dan penilaian Indeks Inovasi Daerah serta Pemberian Penghargaan Innovative Government Award (IGA) Tahun 2025. Berikut skor dan kategori indeks inovasi daerah tahun 2024:

Tabel 3.15. Skor dan Kategori Indeks Inovasi Daerah Tahun 2025

Kategori	Rentang Skor
Sangat Inovatif	60,01 – 100,00
Inovatif	35,00 – 60,00
Kurang Inovatif	0,01 – 34,99
Tidak Dapat Dinilai	0

Sumber: Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tahun 2024

Berdasarkan range tersebut Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan nilai kematangan inovasi daerah 68 masuk pada range sangat inovatif. Berdasarkan hasil kajian rasionalisasi target IKU RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan target Indeks Inovasi Daerah (IID) tahun 2025 adalah 56,75 dengan kategori “Inovatif”, sedangkan untuk IID Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2025 adalah 68 dengan kategori “Sangat Inovatif”.

4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Provinsi dan Nasional

Untuk Nilai Kematangan Inovasi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan tidak dapat dibandingkan dengan Badan/ Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik yang ada di Sumatera Barat, hal ini dikarenakan nilai kematangan inovasi bukan menjadi indikator kinerja pada Badan/ Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten/Kota lainnya.

5. Analisis Penyebab Kegagalan atau Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah dilakukan

Analisis penyebab kegagalan atau penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan pada indikator kinerja nilai akuntabilitas instansi pemerintah dapat dilihat pada tabel 3.16 di bawah ini:

Tabel 3.16. Analisis Kegagalan Kinerja Sasaran Strategis II

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah	Tanpa Satuan	91	68	75

Sumber: Subbag Program, Anggaran dan Keuangan

Kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran terdapat pada indikator kinerja Nilai Kematangan Inovasi hal ini dikarenakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik masih kurang lengkap dalam mengupload eviden/data yang diminta pada aplikasi IGA. Untuk capaian kinerja sudah masuk kategori **sangat inovatif (68)** walaupun gagal dalam pencapaian terget (91). Langkah yang dilakukan untuk mengatasi kegagalan adalah mematangkan proses perencanaan dalam proses penyusunan inovasi pada tahapan pra dan pelaksanaan proses inovasi sampai dengan pengaplikasian dan pengentrian pada aplikasi Innovative Government Award.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk sasaran Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan melaksanakan 1 Program dengan 1 kegiatan. Anggaran untuk melaksanakan program dan kegiatan tersebut berasal dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 sebesar Rp2.000.0000,- Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut belum efektif mencapai sasaran Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah. Rincian anggaran dan realisasi anggaran pendukung sasaran II dapat dilihat pada tabel 3.17 berikut:

Tabel 3.17. Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran Strategis II

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi	Capaian (%)	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi PD	91	68	75	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.000.000	2.000.000	100,00

Sumber: Subbag Program, Anggaran dan Keuangan

Dari jumlah anggaran sebesar Rp2.000.000,- terealisasi sebesar Rp2.000.000,- atau 100%.

Tingkat efisiensi sasaran II Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 214/PMK.02/2017 sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Tingkat Efisiensi} &= \frac{(PA \times CK) - RA}{(PA \times CK)} \times 100\% \\ \text{Tingkat Efisiensi} &= \frac{(2.000.000 \times 75\%) - 2.000.000}{(2.000.000 \times 75\%)} \times 100\% \\ \text{Tingkat Efisiensi} &= \frac{-500.000}{1.500.000} \times 100\% \\ \text{Tingkat Efisiensi} &= -33.33\% \end{aligned}$$

$$\text{Nilai Efisiensi} = 50\% + \frac{\text{tingkat efisiensi}}{20} \times 50$$

$$\text{Nilai Efisiensi} = 50\% + \frac{-33.33\%}{20} \times 50$$

$$\text{Nilai Efisiensi} = 50\% - 1.66\% \times 50$$

$$\text{Nilai Efisiensi} = 50\% - 83.33\%$$

$$\text{Nilai Efisiensi} = -33.33\%$$

Jadi nilai efisiensi pada sasaran II adalah -33.33%

7. Analisis Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan yang Menunjang Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Tujuan dan sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat tercapai melalui pencapaian program dan di dukung oleh kegiatan yang dilaksanakan di tahun 2025 melalui output dari kegiatan tersebut. Adapun capaian program dan kegiatan yang tercantum dalam rencana aksi sasaran strategis II tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 3.18. Capaian Program dan Kegiatan Sasaran Strategis II Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program dan Kegiatan	Indikator Program	Target	Realisasi
1.	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	91	68

Sumber: Subbag Umum dan Kepegawaian

Walupun target kinerja program tercapai 100% namun untuk Indikator kinerja Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah dengan target kinerja 91 dan realisasi kinerja 68, maka persentase capaian kinerjanya adalah 75%. Belum tercapainya target kinerja disebabkan karena masih kurangnya data yang diupload pada aplikasi IGA.

Sasaran 3: Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dan Menjaga Lingkungan Secara Mandiri

1. Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 3.19 berikut ini:

Tabel 3.19. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Sasaran Strategis III

No.	Indikator Kinerja	Satuan	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1.	1. Cakupan Pencegahan atau Tangkal Dini Konflik	Persen	100	100	100
	2. Cakupan Peningkatan Pendidikan Wawasan Kebangsaan dan Pendidikan Politik	Persen	60	69	115
Rata-rata Capaian (%)					107,5

Sumber : Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik dan Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Masyarakat Tahun 2025

Dari tabel 3.19 di atas dapat dilihat rata-rata capaian indikator kinerja sasaran 3 sebesar 107,5%. Dengan demikian, capaian indikator kinerja ini termasuk kategori kinerja “sangat baik”.

Jumlah konflik yang ditangani dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 dapat dilihat pada grafik 3.8 di bawah ini:



Sumber : Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

Dalam pencapaian indikator ini dimana telah terlaksananya penyaluran hibah keuangan untuk 11 (sebelas) partai politik. Pendidikan politik dilaksanakan oleh partai politik untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya anggota partai politik. Salah satu faktor pendukung tingginya realisasi pada sasaran ini adalah adanya peningkatan jumlah ormas yang mendaftar sesuai dengan regulasi dari tahun 2021 - 2025, dapat dilihat dari grafik 3.9 di bawah ini:



Sumber : Bidang Politik dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan



2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

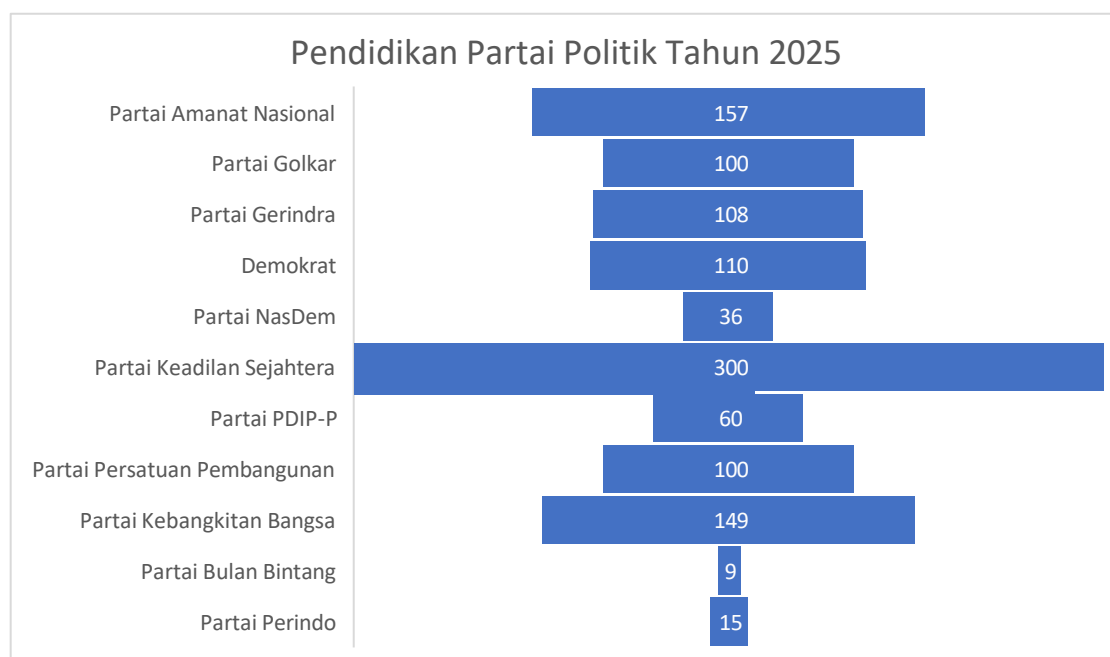
Tabel 3.20. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran Strategis III Tahun 2025 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target					Realisasi					Capaian (%)				
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan dan Menjaga Lingkungan Secara Mandiri	(1)Cakupan Pencegahan atau tangkal dini Konflik	-	-	80%	100%	100%	-	-	100%	100%	100%	-	-	125	100	100
	(2)Cakupan Peningkatan pendidikan wawasan kebangsaan dan pendidikan politik	-	-	30%	40%	60%	-	-	40%	57%	69%	-	-	133	142,5	115

Sumber : Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik; Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan; dan Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Agama

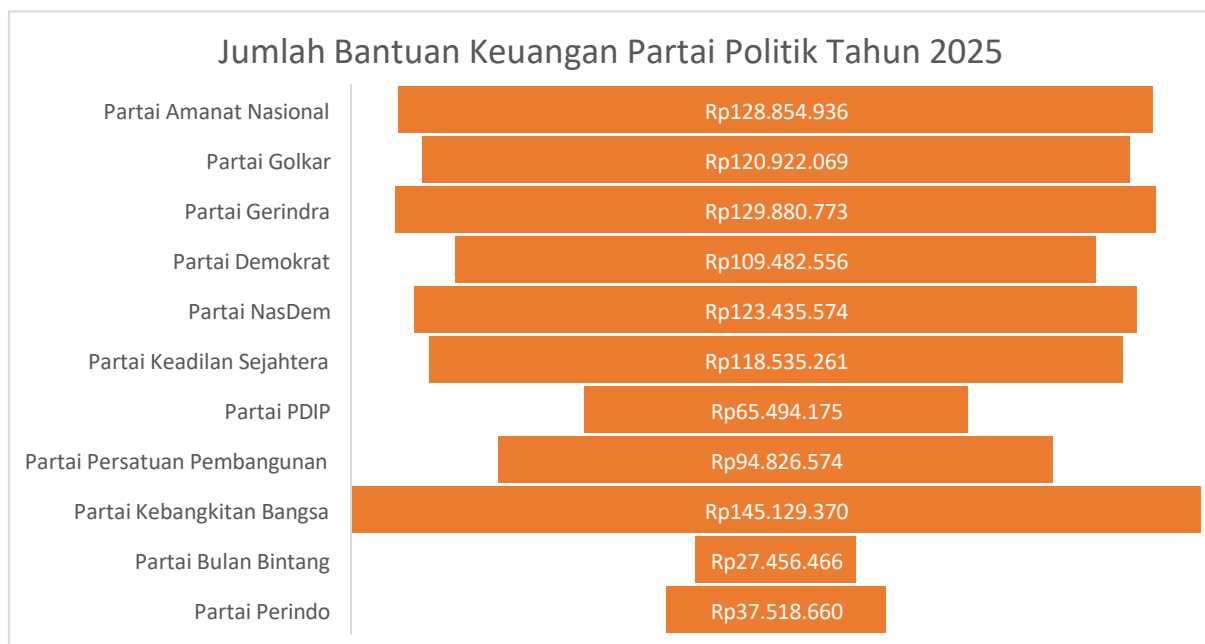
Dari tabel 3.20 di atas dapat dilihat bahwa untuk kedua indikator tidak bisa membandingkan dengan tahun 2021 dan 2022. Untuk indikator kinerja (1) cakupan pencegahan atau tangkal dini konflik tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2021 dan 2022, karena pada tahun 2021 dan 2022 perubahan satuan terhadap perjanjian kinerja di tahun 2023 yang sebelumnya jumlah konflik yang terfasilitasi dengan satuan rekomendasi **menjadi** cakupan pencegahan atau tangkal dini konflik dengan satuan persen. Realisasi indikator kinerja 1 stabil dengan angka realisasi 100% hal ini dikarenakan konflik terjadi di Kabupaten Pesisir Selatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat memfasilitasi sehingga konflik dapat ditangkal dini sbelum pecahnya konflik tersebut.

Sedangkan untuk indikator kinerja (2) persentase pemilu aman, jujur dan adil berubah **menjadi** cakupan pendidikan wawasan kebangsaan dan pendidikan politik sehingga terjadi perubahan formulasi, maka di tahun 2021 dan 2022 tidak bisa dibandingkan dengan tahun 2023, 2024 dan 2025. Peningkatan target kinerja tahun 2024 ke tahun 2025 disebabkan karena baik pada target ideologi wawasan kebangsaan maupun koordinasi partai politik dan ormas melebihi target yang ditargetkan tahun lalu. Rekapitulasi Pendidikan Politik yang dilaksanakan oleh Partai Politik Tahun Anggaran 2025 di Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada grafik 3.10 di bawah ini:



Sumber: Bidang Politik dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan

Jumlah bantuan keuangan partai politik tahun 2025 diberikan kepada 11 partai politik dapat dilihat pada grafik 3.11 di bawah ini:



Sumber: Data Bidang Politik dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan

Untuk meningkatkan kualitas demokrasi ditengah masyarakat maka perlu dilakukan optimalisasi pendidikan politik masyarakat untuk membangun etika dan moral politik serta kedewasaan perilaku demokrasi. Selain itu penguatan peran partai politik dan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan juga perlu menjadi perhatian bagi pemerintah daerah.

3. Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Tabel 3.21. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis III dengan Target dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Target Kinerja	Keterangan
Sasaran III : Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan menjaga lingkungan secara mandiri	1.Cakupan Pencegahan atau tangkal dini konflik	100%	100%	
	2. Cakupan Peningkatan pendidikan wawasan kebangsaan dan pendidikan politik	69%	60%	

Sumber: Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik; Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Agama

Realisasi kinerja pada sasaran III dengan 2 (dua) indikator **(1) Cakupan pencegahan atau tangkal dini konflik** dengan target 100 % dan realisasi 100 % hal ini merujuk pada konflik yang terjadi selama tahun 2025 sebanyak 17 konflik dapat difasilitasi dengan baik oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik **(2) Cakupan peningkatan pendidikan wawasan kebangsaan dan pendidikan politik** dengan target 60% terealisasi sebesar 69%, dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa Politik melakukan koordinasi dengan 11 partai politik untuk periode 2024-2029. Dana hibah bantuan keuangan diperuntukkan untuk melakukan pendidikan politik bagi kader partai dan masyarakat.

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Secara nasional urusan Kesatuan Bangsa dan Politik diarahkan untuk memelihara dan mempertahankan kedaulatan dan keutuhan bangsa, membangun dan memelihara kondisi keamanan dan ketertiban umum masyarakat serta meningkatkan dukungan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat melalui berbagai program dan kegiatan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan tertib serta antisipatif terhadap munculnya kerawanan konflik sosial, politik serta bencana yang dapat meresahkan masyarakat. Masalah keamanan merupakan kebutuhan semua pihak, sehingga kewaspadaan dini perlu dilakukan oleh rakyat Indonesia pada umumnya dan masyarakat Pesisir Selatan khususnya.

Benchmarking adalah proses membandingkan kinerja atau hasil suatu wilayah dengan wilayah lain. Benchmarking dapat dilakukan antar provinsi atau antar wilayah yang lebih dari satu. Di bawah ini adalah tabel perbandingan sasaran III indikator 1 “Cakupan Pencegahan atau tangkal dini konflik Kabupaten Pesisir Selatan” dengan beberapa wilayah lain:

Tabel 3.22. Benchmarking Cakupan Pencegahan atau Tangkal Dini Konflik
Kabupaten Pesisir Selatan dengan Kabupeten/Kota Lain

No.	Kabupaten/ Kota	Jumlah Konflik
1.	Kota Padang	16
2.	Kota Pariaman	13
3.	Kota Sawahlunto	12
4.	Kota Padang Panjang	17
5.	Kota Solok	14
6.	Kota Bukittinggi	12
7.	Kota Payakumbuh	14
8.	Kabupaten Padang Pariaman	16
9.	Kabupaten Pesisir Selatan	17
10.	Kabupaten Solok	14
11.	Kabupaten Solok Selatan	14
12.	Kabupaten Tanah Datar	19
13.	Kabupaten Limapuluh Kota	21
14.	Kabupaten Pasaman	13
15.	Kabupaten Pasaman Barat	18
16.	Kabupaten Dharmasraya	10
17.	Kabupaten Kepulauan Mentawai	13
18.	Kabupaten Sijunjung	14
19.	Kabupaten Agam	14

Sumber: LKj Tahun 2025 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat

Untuk sasaran III indikator 2 “Cakupan Peningkatan pendidikan wawasan kebangsaan dan pendidikan politik Badan Kestuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan” jika dibandingkan dengan target nasional, sampai saat ini belum ada penetapan target Peningkatan pendidikan wawasan kebangsaan dan pendidikan politik baik tingkat nasional ataupun regional, sehingga indikator kinerja 2 ini tidak dapat dibandingkan dengan tingkat nasional/regional atau daerah lain.

5. Analisa Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah dilakukan

Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan pada indikator kinerja sasaran III dapat dilihat pada Tabel 3.23 dibawah ini :

Tabel 3.23. Analisis Keberhasilan Kinerja Sasaran Strategis III

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Sasaran III : Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan dan Menjaga Lingkungan Secara Mandiri	(1) Cakupan Pencegahan atau Tangkal Dini Konflik	Persentase	100	100	100
	(2) Cakupan peningkatan pendidikan Wawasan Kebangsaan dan Pendidikan Politik	Persentase	60	69	115
Rata – rata capaian (%)					107.5

Sumber: Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik dan Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan; dan Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Agama

Berdasarkan tabel diatas, tingginya realisasi dari target dengan indikator kinerja sebagai berikut:

a. Cakupan Pencegahan atau Tangkal Dini Konflik

Untuk indikator kinerja “Cakupan Pencegahan atau Tangkal Dini Konflik” digunakan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Cakupan Pencegahan atau Tangkal Dini Konflik} = \frac{\sum \frac{\text{potensi Konflik yang terdeteksi, terbahas dan tertangani dalam rakor kewaspadaan dini masyarakat (KDM)}}{\sum \text{Konflik yang dilaporkan}} \times 100\%$$

$$\text{Cakupan Pencegahan atau Tangkal Dini Konflik} = \frac{17 \text{ Konflik}}{17 \text{ Konflik}} \times 100\%$$

$$\text{Cakupan Pencegahan atau Tangkal Dini Konflik} = 100\%$$

Sumber: Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

Untuk sasaran III indikator 1 kategori predikat capaian kinerjanya adalah sangat baik. Klasifikasi penilaian indikator 1 ini melalui Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penangan Konflik merujuk pada klasifikasi penilaian Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.24. Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja

No	Klasifikasi Penilaian	Predikat
1	85% - 100%	Sangat Baik
2	69% - 84%	Baik
3	53% - 68%	Cukup
4	< 53%	Gagal

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Target kinerja Cakupan Pencegahan atau Tangkal Dini Konflik terealisasi sebesar 100% dengan target kinerja 100%, maka capaian kinerjanya adalah 100% sehingga predikat penilaian kinerjanya **“Sangat Baik”**. Cakupan pencegahan atau Tangkal Dini Konflik di dukung oleh Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial pada sub kegiatan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota.

Pentingnya kewaspadaan keamanan diantisipasi secara dini dengan penuh kepekaan dan kesiapsiagaan karena benturan kepentingan ekonomi, politik, sosial, agama, etnis dan ideologi setiap saat bisa muncul. Mencermati perkembangan situasi dan kondisi secara paten global secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi situasi dan kondisi di daerah khususnya wilayah Kabupaten Pesisir Selatan. Potensi konflik yang terjadi di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan antara lain konflik agraria dan SDA, sosial ekonomi dan budaya. Berdasarkan hasil laporan dari Bidang Kewaspadaan dan Penanganan Konflik Sosial Jumlah konflik yang ditangani selama tahun 2025 sebanyak 17 konflik yang telah difasilitasi.

Tingginya jumlah konflik yang terjadi dapat disebabkan oleh beberapa faktor yaitu:

- 1) Adanya ketidakpuasan dan perbedaan kepentingan (ekonomi, politik, sosial, agama, etnis dan ideologi) yang mengakibatkan perseteruan atau benturan antar masyarakat.
- 2) Sulitnya memetakan potensi konflik secara rinci pada masing-masing kecamatan karena kondisi masyarakat yang dinamis.
- 3) Rasa ketidakadilan yang dinilai berat sebelah.
- 4) Pergeseran tata nilai dan tata laku sosial budaya masyarakat.
- 5) Keterbatasan dan minimnya informasi yang diperoleh dari masyarakat yang berkaitan dengan pendeteksian dan pencegahan dini.

Berikut ini adalah beberapa dokumentasi konflik yang telah difasilitasi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024:

- 1) Aksi demonstrasi Mahasiswa dengan Pimpinan Daerah



Gambar 3.11. Aksi demonstrasi Mahasiswa dengan Pimpinan Daerah

Sumber : Humas POLRES PESSEL

2) Aksi demonstrasi Masyarakat dengan Pihak Galian C



Gambar 3.12. Aksi demonstrasi Masyarakat dengan Pihak Galian C

Sumber : Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

3) Warga Nagari Silaut Gelar Aksi Damai, Desak PT Sukses Jaya Wood Kembalikan Lahan



Gambar 3.13. Aksi Demonstrasi Warga Nagari Silaut Desak PT Sukses Jaya Wood Kembalikan Lahan

Sumber : Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

b. Cakupan Peningkatan Pendidikan Wawasan Kebangsaan dan Pendidikan Politik

Untuk indikator kinerja “Cakupan Peningkatan Pendidikan Wawasan Kebangsaan dan Pendidikan Politik” digunakan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Cakupan Peningkatan Pendidikan Wawasan Kebangsaan dan Pendidikan Politik} = \frac{\sum \text{pendidikan wawasan kebangsaan dan pendidikan politik}}{\sum \text{Kelompok masyarakat sasaran pendidikan wawasan kebangsaan dan pendidikan politik}} \times 100\%$$

$$\text{Cakupan Peningkatan Pendidikan Wawasan Kebangsaan dan Pendidikan Politik} = \frac{1114 \text{ Orang}}{1610 \text{ Orang}} \times 100\%$$

$$\text{Cakupan Peningkatan Pendidikan Wawasan Kebangsaan dan Pendidikan Politik} = 69\%$$

Sumber: Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan dan Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Agama

Untuk sasaran III indikator 2 kategori predikat capaian kinerjanya adalah sangat baik. Klasifikasi penilaian indikator 1 ini melalui Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penangan Konflik merujuk pada klasifikasi penilaian Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.25. Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja

No	Klasifikasi Penilaian	Predikat
1	85% - 100%	Sangat Baik
2	69% - 84%	Baik
3	53% - 68%	Cukup
4	< 53%	Gagal

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Target kinerja Cakupan Peningkatan Pendidikan Wawasan Kebangsaan dan Pendidikan Politik terealisasi sebesar 69% dengan target kinerja 60%, maka capaian kinerjanya adalah 115% sehingga predikat penilaian kinerjanya **“Sangat Baik”**.

Cakupan peningkatan Pendidikan wawasan kebangsaan dan Pendidikan politik dukung oleh Program Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik dan Program pemberdayaan dan Pengawasan

Organisasi Kemasyarakatan. Dan Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya.

Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi peningkatan cakupan pendidikan Wawasan Kebangsaan dan Pendidikan Politik adalah:

1) Pendidikan

Dalam sistem pendidikan, kita belajar tentang sejarah bangsa, nilai-nilai budaya, dan pentingnya persatuan. Di sekolah, kita diajarkan untuk menghargai keragaman dan pluralitas yang ada dalam masyarakat kita.

2) Sejarah Bangsa

Sejarah adalah cermin dari identitas bangsa. Melalui pemahaman yang mendalam tentang sejarah bangsa kita, kita dapat mengenali akar-akar perjuangan dan pencapaian yang telah membentuk kita menjadi apa yang kita adalah saat ini. Sejarah bangsa adalah kisah tentang perjuangan, penderitaan, dan kebangkitan yang telah membentuk karakter bangsa kita

3) Budaya dan Identitas

Kebudayaan adalah salah satu elemen yang paling kuat dalam membentuk Wawasan Kebangsaan. Budaya mencakup bahasa, adat istiadat, seni, dan nilai-nilai yang kita warisi dari generasi sebelumnya. Memahami dan merayakan budaya kita adalah cara untuk menghargai kekayaan warisan yang kita miliki sebagai bangsa.

4) Peran Pemerintah

Pemerintah memainkan peran penting dalam membentuk Wawasan Kebangsaan melalui kebijakan dan program-program pendidikan. Pemerintah juga memiliki tanggung jawab untuk mempromosikan nilai-nilai kebangsaan yang positif dan mendukung kerja sama antar warga negara. Kebijakan yang bijaksana dan pemimpin yang visioner dapat memperkuat ikatan antara pemerintah dan rakyat, menciptakan kebanggaan nasional, dan mendorong persatuan

Dokumentasi beberapa Hari Besar Nasional dan kegiatan Wawasan Kebangsaan lainnya yang telah diakomodir oleh Badan Kestuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025:

a) Upacara Hari Besar Nasional



Gambar 3.14. Upacara Hari Besar Nasional

Sumber: Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama

b) Gerakan Nasional Pembagian 10 Juta Bendera Merah Putih



Gambar 3.15. Gerakan Nasional Pembagian 10 Juta Bendera Merah Putih

Sumber: Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama

c) Pembentukan Paskibraka



Gambar 3.16. Pengukuhan Paskibraka

Sumber: Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama

Beberapa dokumentasi (Gambar 3.17) kegiatan pada Bidang Politik Dalam Negeri dan Ormas serta pendidikan politik yang dilakukan oleh Partai Politik tahun 2025:

**a. Pendidikan Politik yang dilakukan oleh Partai Politik
Gerindra**



Sumber : Bidang Politik dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan

Hanura



Sumber : Bidang Politik dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan

Partai Golongan Karya (Golkar)



Sumber : Bidang Politik dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan

Partai Persatuan Pembangunan (PPP)



Sumber : Bidang Politik dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)



Sumber : Bidang Politik dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan

Partai Bulan Bintang (PBB)



Sumber : Bidang Politik dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan

Partai Perindo (Perindo)



Sumber : Bidang Politik dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan

b. Ormas yang Terdaftar, Sesuai dengan Regulasi dan Kegiatan Ormas Lainnya



Sumber : Bidang Politik dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan



Sumber : Bidang Politik dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan



Sumber : Dokumentasi Kegiatan Bidang Politik dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Untuk sasaran Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dan Menjaga Lingkungan Secara Mandiri, Badan Kesatua Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan melaksanakan 4 Program dengan 4 kegiatan. Anggaran untuk melaksanakan program dan kegiatan tersebut berasal dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 sebesar Rp2.275.775.382,- Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut belum efektif mencapai sasaran Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah. Rincian anggaran dan realisasi anggaran pendukung sasaran III dapat dilihat pada tabel 35 berikut:

Tabel 3.26. Anggaran dan Realisasi Anggran Program Pendukung Sasaran Strategis III

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	Realisasi	Capaian (%)	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat	Cakupan Pencegahan atau	100 %	100%	100	Program Peningkatan Kewaspadaan	257.977.500,-	105.889.960,-	41.05

	dalam Pembangunan dan Menjaga Lingkungan Secara Mandiri	Tangkal Dini Konflik				Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial			
		Cakupan Peningkatan Pendidikan Wawasan Kebangsaan dan Pendidikan Politik	60%	69%	115	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	806.345.468	775.222.007	96,14
						Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	-	-	-
						Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	1.176.536.414	1.101.536.414	93,63
						Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	34.916.000	34.905.925	99,97

Sumber: Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik dan Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan

Dari jumlah anggaran sebesar Rp2.275.775.382,- terealisasi sebesar Rp2.017.554.306,- atau 89%. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran III terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp258.221.076,- (11%).

Tingkat efisiensi sasaran III Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 214/PMK.02/2017 sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Tingkat Efisiensi} &= \frac{(PA \times CK) - RA}{PA} \times 100\% \\
 \text{Tingkat Efisiensi} &= \frac{(2.275.775.382 \times 107,5\%) - 2.017.554.306}{(2.275.775.382 \times 107,5\%)} \times 100\% \\
 \text{Tingkat Efisiensi} &= \frac{428.904.229,65}{2.446.458.535,65} \times 100\%
 \end{aligned}$$

$$\text{Tingkat Efisiensi} = 17,53\%$$

$$\text{Nilai Efisiensi} = 50\% + \frac{\text{tingkat efisiensi}}{20} \times 50$$

$$\text{Nilai Efisiensi} = 50\% + \frac{17,53\%}{20} \times 50$$

$$\text{Nilai Efisiensi} = 50\% + 43,83\%$$

$$\text{Nilai Efisiensi} = 93,83\%$$

Jadi nilai efisiensi pada sasaran III adalah 93,83%

7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja

Tujuan dan sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat tercapai melalui pencapaian program dan di dukung oleh kegiatan yang dilaksanakan di tahun 2025 melalui output dari kegiatan tersebut. Adapun capaian program dan kegiatan yang tercantum dalam rencana aksi sasaran strategis III tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 3.27. Capaian Program dan Kegiatan Sasaran Strategis III Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program dan Kegiatan	Indikator Program	Target	Realisasi
1.	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan dan menjaga lingkungan secara mandiri	Cakupan pencegahan atau tangkal dini konflik	Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Persentase konflik yang ditangani	100%	100%
		Cakupan peningkatan pendidikan wawasan kebangsaan dan pendidikan politik	1. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1. Jumlah Masyarakat yang meningkat wawasan kebangsaannya	500 Orang	3149 Orang
			2. Program Pembinaan dan Pengembangan	2. Persentase hasil pembinaan dan pengembangan	85%	0%

			Ketahanan Ekonomi , Sosial dan Budaya	ketahanan ekonomi, sosial dan budaya		
			3. Program peningkatan peran partai politik dan lembaga melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	3. Persentase pemahaman politik di kalangan masyarakat/ aparatur daerah serta terciptanya stabilitas politik pemerintahan yang kondusif di daerah	85%	85%
			4. Program pemberdayaan dan pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	4. Ormas yang Melaksanakan Aktivitas Sesuai Regulasi	83 Ormas	78 Ormas

Sumber : Subbag Program, Anggaran dan Keuangan

Program yang berhasil menunjang keberhasilan pencapaian perjanjian kinerja adalah:

- b. Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial.

Keberhasilan program ini karena meningkatnya koordinasi lintas *stakeholders* dalam menciptakan keamanan dan kenyamanan masyarakat baik dalam rangka mencegah konflik, menghentikan konflik dan memulihkan kondisi pasca konflik.

- c. Program peningkatan peran partai politik dan lembaga melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik.

Keberhasilan Program peningkatan peran partai politik dan lembaga melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik didukung dengan kegiatan adanya Hibah Keuangan kepada Partai Politik.

Program yang belum berhasil/gagal menunjang keberhasilan pencapaian perjanjian kinerja adalah:

a. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi , Sosial dan Budaya

Belum berhasilnya program ini menunjang keberhasilan perjanjian kinerja disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:

- 1) Kabupaten Pesisir Selatan belum membentuk tim dan forum-forum strategis daerah di antaranya Forum Kerukunan Umat Beragama dan Forum Pembauran Kebangsaan sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri sehingga output yang diharapkan dari keberadaan forum-forum ini belum tercapai secara maksimal.
- 2) Tahun 2025 anggaran untuk program ini Rp0,-, sehingga kegiatan pengawasan dan pencegahan PEKAT (Penyakit Masyarakat) tidak dapat terlaksana.

b. Program pemberdayaan dan pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Program pemberdayaan dan pengawasan Ormas ini belum mencapai target 83 Ormas yang terdata sesuai dengan regulasi. Sampai dengan akhir Desember 2025 ini Ormas yang tercatat sesuai dengan regulasi ada sebanyak 78 Ormas. Belum tercapainya target ini dikarenakan:

- 1) Pelaksanaan kebijakan pembinaan Ormas belum dilaksanakan secara optimal, hal ini dikarenakan komunikasi belum efektif, sumberdaya dalam penanganan organisasi kemasyarakatan belum memadai.
- 2) Belum optimalnya hibauan serta pemebritahuan terhadap Ormas yang ada di daerah untuk melakukan pencatatan Ormas sesuai dengan regulasi.
- 3) Kurangnya keinginan Ormas di daerah untuk melakukan pencatatan pendaftaran Ormasnya ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

3.4 Realisasi Keuangan

Anggaran dan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah Badan Kesbangpol untuk tahun 2025 pelaksanaan program dan kegiatan yang menunjang

pencapaian 3 (tiga) sasaran strategis yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025 tercantum pada tabel 3.28 di bawah ini:

Tabel 3.28. Realisasi Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025

No.	SASARAN STRATEGIS	TAHUN 2025		
		ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
		(Rp.)	(Rp.)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Terwujudnya Pemerintahan Yang Akuntabel dan Berkinerja	3.062.166.171	3.007.626.878	98,22
2.	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	2.000.000	2.000.000	100
3.	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan dan menjaga lingkungan secara mandiri	2.275.775.382	2.017.554.306	89
TOTAL		5.339.941.553	5.027.181.184	94,14

Plafon anggaran yang disediakan pada tahun 2025 sebesar Rp5.339.941.553 dan terealisasi sebesar Rp5.027.181.184,- sehingga persentase realisasi keuangan tahun 2025 adalah sebesar 94.14%.

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Penyelenggaraan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 merupakan tahun ke 4 (empat) dari Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2021 – 2026. Keberhasilan yang dicapai berkat kerjasama dan partisipasi semua pihak dan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak. Hasil laporan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat disimpulkan :

1. Capaian Sasaran

Dari 3 (tiga) sasaran yang telah ditetapkan, 2 (dua) sasaran mempunyai capaian indikator kinerja mencapai lebih dari 100% atau lebih, dan rata-rata nilai capaian indikator kinerja dengan nilai tertinggi adalah 115% yaitu “Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan menjaga lingkungan secara mandiri”. Untuk nilai terendah dari 3 sasaran yang telah ditetapkan tersebut adalah 75% yaitu sasaran “Meningkatnya kualitas inovasi daerah”.

2. Capaian Indikator Kinerja

Dari 4 (empat) indikator kinerja yang telah ditetapkan sebanyak 2 (dua) indikator kinerja berhasil mencapai dan melampaui target dan 2 (dua) indikator yang tidak mencapai target. Persentase indikator kinerja yang berhasil sama atau melebihi target kinerja adalah 50% dan yang belum berhasil memenuhi target kinerja adalah 50%. Indikator kinerja yang berhasil targetnya berhasil dicapai adalah a. Cakupan Pencegahan atau Tangkal Dini Konflik dengan persentase capaian kinerja adalah 100%; b. Cakupan Peningkatan Pendidikan Wawasan Kebangsaan dan Pendidikan Politik dengan persentase capaian kinerja adalah 115%. Indikator kinerja yang targetnya belum berhasil adalah a. Nilai AKIP Perangkat Daerah dengan capaian persentase capaian kinerja 99.98%; b. Nilai

Kematangan Inovasi Perangkat Daerah dengan persentase capaian kinerja 75%. Belum tercapainya target kinerja disebabkan karena masih kurangnya data yang diupload pada aplikasi IGA.

3. Capaian Realisasi Anggaran dalam Pencapaian Sasaran

Plafon anggaran Badan Kesbangpol tahun 2025 teralisasi sebesar Rp5.027.181.184,- atau sebesar 99,14% dari target alokasi yang ditetapkan sebesar Rp5.339.941.553,-. Dari tiga sasaran strategis, capaian anggaran belanja sasaran strategis tertinggi adalah “Nilai AKIP Perangkat Daerah” yaitu 98,22%.

4.2 Saran

Untuk mempertahankan dan meningkatkan pencapaian kinerja dan realisasi anggaran maka perlu dilakukan upaya-upaya antara lain:

1. Meningkatkan komitmen antar bidang di jajaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan dalam penerapan manajemen berbasis kinerja, khususnya dalam perencanaan kinerja maupun monitoring dan evaluasi capaian kinerja.
2. Mengoptimalkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber daya dan dana melalui berbagai program dan kegiatan yang berorientasi pada outcome sehingga tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat tercapai.
3. Melakukan koordinasi yang intensif serta meningkatkan kolaborasi antar bidang yang berada dalam lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan dan stakeholder lainnya, instansi pemerintah maupun pihak pihak terkait lainnya dalam pelaksanaan kegiatan.
4. Optimalisasi pelayanan internal maupun kepada masyarakat dengan menggunakan pengembangan IT dan e-Government



Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2025 ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan tahun berikutnya serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.



LAMPIRAN



Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **GESTROJONI, S.Pd., M.M.**

Jabatan : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **Drs. RUSMA YUL ANWAR, M.Pd.**

Jabatan : Bupati Pesisir Selatan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Painan, 20 Januari 2025

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK KABUPATEN PESISIR SELATAN**

BUPATI PESISIR SELATAN,

Drs. RUSMA YUL ANWAR, M.Pd.


GESTROJONI, S.Pd., M.M.
NIP. 19691106 199603 1 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PESIR SELATAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP Perangkat Daerah	A (82)
2.	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi PD	91
3.	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dan Menjaga Lingkungan Secara Mandiri	Cakupan Pencegahan atau Tangkal Dini Konflik	100%
		Cakupan Peningkatan Pendidikan Wawasan Kebangsaan dan Pendidikan Politik	60%

	Program		Anggaran	Keterangan
1.	Program Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp	3.324.909.514,25	APBD
2.	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Rp	824.999.556,75	APBD
3.	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Rp	1.101.536.414	APBD
4.	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp	43.463.100	APBD
5.	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Rp	215.000.000	APBD

Palnan, 20 Januari 2025

BUPATI PESIR SELATAN,

Drs. RUSMA YUL ANWAR, M.Pd.

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PESIR SELATAN**

GESTROJONI, S.Pd., M.M.
NIP. 19691106 199603 1 002



REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PESIR SELATAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **GESTROJONI, S.Pd., M.M.**
Jabatan : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **H. HENDRAJONI., S.H., M.H.**
Jabatan : Bupati Pesisir Selatan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

BUPATI PESIR SELATAN



H. HENDRAJONI, S.H., M.H.

Painan, 15 Oktober 2025

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KABUPATEN PESIR
SELATAN**



GESTROJONI, S.Pd., M.M.

NIP. 19691106 199603 1 002



**REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PESIR SELATAN**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP Perangkat Daerah	A (82)
2.	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi PD	91
3.	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dan Menjaga Lingkungan Secara Mandiri	Cakupan Pencegahan atau Tangkal Dini Konflik	100%
		Cakupan Peningkatan Pendidikan Wawasan Kebangsaan dan Pendidikan Politik	60%

	Program		Anggaran	Keterangan
1.	Program Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp	3.144.575.453	APBDP
2.	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Rp	806.345.468	APBDP
3.	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Rp	1.176.536.414	APBDP
4.	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp	34.916.000	APBDP
5.	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Rp	257.977.500	APBDP
Jumlah:		Rp	5.420.350.835	APBDP


BUPATI PESIR SELATAN,
H. HENDRAJONI, S.H., M.H.

Painan, 15 Oktober 2025
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PESIR SELATAN

GESTROJONI, S.Pd., M.M.
NIP. 19691106 199603 1 002



Lampiran 2. Indikator Kinerja Utama pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jalan Rohana Kudus - P A I N A N

**KEPUTUSAN
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 900/ 08 /BKPd-PS/2023**

TENTANG

**INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2021 – 2026**

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PESISIR SELATAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka memberikan informasi kinerja dan ukuran kinerja keberhasilan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam pencapaian tujuan dan sasaran pada Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2021 – 2026, perlu ditetapkan indikator kinerja utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang spesifik, relevan dan terukur;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Perdayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021- 2026, dengan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), Jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintahan Tahapan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2006 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026;
 10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 104 tahun 2021 tentang Rencana Strategis Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021-2026;
 11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 178 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PESIR SELATAN TAHUN 2021-2026.
- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama pada Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tersebut dalam daftar Lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama Badan sebagaimana dimaksud diktum KEDUA merupakan acuan kinerja yang dipergunakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan untuk menetapkan:
1. Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan;
 2. Penetapan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan;
 3. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan;
 4. Evaluasi Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan;
 5. Pemantauan dan Pengendalian Kinerja Pelaksana Program dan Kegiatan Lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan;
- KETIGA : Capaian Indikator Kinerja Utama merupakan tolak ukur dalam penilaian kinerja Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Painan
Pada Tanggal : 23 Januari 2023

Kepala Badan,

HARDI DARMA PUTRA, S.H.M.Si
Pembina Tk. IV/b)
NIP. 19670901198602 1 001



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PESIR SELATAN

Nomor : 900/ 08 /BKPol-PS/2023

Tanggal : 23 Januari 2023

Tentang : Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026

I. Penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 – 2026

PEJABAT : ESSELON II

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Tanpa Satuan	N/A	N/A	65 (B)	65 (B)	65 (B)	65 (B)
		Nilai AKIP Perangkat Daerah	Tanpa Satuan	BB (71.8)	BB (72)	A (81)	A (81.2)	A (81.5)	A (82)
2.	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi PD	Tanpa Satuan	N/A	100	100	100	100	100
3.	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dan Menjaga Lingkungan Secara Mandiri	Cakupan pencegahan atau tangkal dini konflik	%	80	80	80	80	100	100
		Cakupan Peningkatan Pendidikan wawasan kebangsaan dan Pendidikan Politik	%	N/A	N/A	30	30	35	35



PEJABAT : ESSELON III

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatnya Nilai Evaluasi Sakip Badan Kesbangpol	Nilai Komponen Perencanaan pada evaluasi SAKIP Badan Kesbangpol	Tanpa Satuan	BB (71.8)	BB (72)	A (81)	A (81.2)	A (81.5)	A (82)
2.	Meningkatnya Pelayanan Umum dan Kepegawaian Badan Kesbangpol	Tingkat Kepuasan Terhadap Layanan Kepegawaian	Tanpa Satuan	Memuaskan	Memuaskan	Memuaskan	Sangat Puas	Sangat Puas	Sangat Puas
3.	Meningkatnya Inovasi	Jumlah Inovasi Per Bidang (1)	Inovasi	N/A	1	3	3	3	3
4.	Meningkatkan Peran Forum Strategis Daerah dalam Pencegahan dan Penanganan Konflik	Persentase Rekomendasi Penanganan Konflik yang ditindak Lanjuti	%	80	80	80	80	100	100
5.	Meningkatnya Fasilitasi tentang Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa	Jumlah Penyelenggaraan Pendidikan Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa	Kali	N/A	2	2	3	4	5
6.	Menurunnya Penyakit Masyarakat	Persentase Penurunan Kasus Penyalahgunaan	%	N/A	3	2	2	1	1



		Narkoba							
		Persentase Penurunan Kasus Kenakalan Remaja	%	N/A	N/A	3	2	1	1
7.	Meningkatnya Peran Lembaga Politik/Ormas untuk Kesejahteraan Masyarakat	Persentase Aspirasi Masyarakat yang diterima dari Perwakilan Partai Politik	%	N/A	N/A	55	60	60	65

KINERJA OPERASIONAL

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Tersusunnya Dokumen Perangkat Daerah tepat waktu	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah yang disusun Tepat Waktu	Dokumen	3 (Renstra, RKA Perubahan, RKA)	3 (Renstra, RKA Perubahan, RKA)	3 (Renstra, RKA Perubahan, RKA)	3 (Renstra, RKA Perubahan, RKA)	3 (Renstra, RKA Perubahan, RKA)	3 (Renstra, RKA Perubahan, RKA)
2.	Meningkatnya Kualitas Data Kinerja Badan kesbangpol	Jumlah Dokumen Data Sektoral yang dikelola	Dokumen	N/A	3	3	4	4	5
3.	Meningkatnya Layanan Kepegawaian	Persentase Dokumen Kepegawaian Tepat Waktu	%	100	100	100	100	100	100



4.	Meningkatnya Kualitas Layanan Surat Menyurat	Persentase Layanan Surat Menyurat Sesuai SOP	%	100	100	100	100	100	100
5.	Meningkatnya SDM Kesbangpol	Jumlah Pelatihan Kantor Sendiri	Kali	N/A	N/A	1	1	1	1
6.	Informasi Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Jumlah Data Konflik	Konflik	5	10	10	10	10	10
7.	Meningkatnya Masyarakat yang Mengikuti Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa	Jumlah Masyarakat yang Mengikuti Penyelenggaraan Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa	Orang	N/A	500	500	500	500	500
8.	Meningkatkan Fasilitas Pencegahan dan Pengawasan PEKAT	Jumlah Penyelenggaraan Pencegahan Pekat	Kali	N/A	1	2	2	3	3
		Jumlah Penyelenggaraan Pengawasan Pekat	Kali	N/A	1	1	1	1	1
9.	Meningkatkan Efektifitas Kelembagaan Demokrasi	Persentase Lembaga Politik (Partai/Ormas) yang sesuai dengan Regulasi	%	80	80	80	80	85	85

II. Penjelasan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 – 2026

Agar seluruh stakeholder Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memiliki persepsi yang sama terhadap IKU Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026, maka setiap indikator akan dijelaskan terkait definisi operasional, formula perhitungan, sumber data dan perangkat daerah penanggung jawab/ pelaksana program untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Penjelasan masing-masing IKU Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah

Level dalam Resntra	: Indikator Kinerja Utama Sasaran
Definisi Oprasional	: Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah merupakan nilai yang dikeluarkan oleh Tim Asesor Internal Pemerintah Daerah dengan melakukan penilaian secara mandiri berdasarkan ketentuan yang berlaku berdasarkan pada pemenuhan nilai pengungkit 60% dan hasil 40%. Nilai ini setiap tahunnya diberikan oleh Inspektorat Daerah sebagai Assesor sebagaimana tertuang dalam Permenpan RB no 26 tahun 2020.
Formula	: Hasil penilaian Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat Daerah
Sumber Data	: Laporan hasil penilaian Reformasi Birokrasi
Penanggung jawab	: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

2. Nilai AKIP Perangkat Daerah

Level dalam Resntra	: Indikator Kinerja Utama Sasaran
Definisi Oprasional	: Nilai AKIP merupakan hasil penilaian terhadap Akuntabilitas Kinerja yang dinilai dari 4 komponen yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.
Formula	: Hasil penilaian Inspektorat Daerah
Sumber Data	: Laporan hasil evaluasi AKIP dari Inspektorat Daerah
Penanggung jawab	: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

3. Nilai Kematangan Inovasi PD

Level dalam Resntra	: Indikator Kinerja Utama Sasaran
Definisi Oprasional	: Nilai kematangan inovasi merupakan nilai ambang batas minimal dari sebuah inovasi yang dihasilkan oleh perangkat daerah untuk di entrikan dalam aplikasi IGA Kemendagri.
Formula	: Hasil penilaian saat pengentrian kriteria inovasi pada aplikasi IGA
Sumber Data	: Aplikasi pengentrian kriteria inovasi dari Kemendagri
Penanggung jawab	: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

4. Cakupan Pencegahan atau Tangkal Dini Konflik

Level dalam Resntra	: Indikator Kinerja Utama Sasaran
Definisi Oprasional	: Cakupan pencegahan atau tangkal dini konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam situasi dan peristiwa baik sebelum pada saat, maupun sesudah terjadi konflik yang mencakup pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pasca konflik.

Formula	:	$\frac{\sum \text{potensi konflik yang terdeteksi, terbahas dan tertangani dalam rakor kewaspadaan dini masyarakat (KDM)}}{\sum \text{konflik yang dilaporkan}} \times 100\%$
Sumber Data	:	Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Penanggung jawab	:	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
5. Cakupan Peningkatan Pendidikan Wawasan Kebangsaan dan Pendidikan Politik		
Level dalam Resntra	:	Indikator Kinerja Utama Sasaran
Definisi Oprasional	:	Persentase Kelompok masyarakat yang mendapatkan Pendidikan Wawasan Kebangsaan dan Pendidikan Politik
Formula	:	$\frac{\sum \text{Kelompok masyarakat yang mendapatkan Pendidikan Wawasan Kebangsaan dan Pendidikan Politik}}{\sum \text{Kelompok masyarakat Sasaran Pendidikan Wawasan Kebangsaan dan Pendidikan Politik}} \times 100\%$
Sumber Data	:	Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Agama; Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan
Penanggung jawab	:	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
6. Nilai Komponen Perencanaan pada Evaluasi SAKIP Badan Kesbangpol		
Level dalam Resntra	:	Kinerja Taktikal
Definisi Oprasional	:	Nilai komponen perencanaan pada evaluasi SAKIP Badan Kesbangpol merupakan nilai komponen perencanaan yang terdapat pada LHE LKj.
Formula	:	Nilai komponen perencanaan pada LHE LKj
Sumber Data	:	Inpektorat Daerah
Penanggung jawab	:	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
7. Tingkat Kepuasan Terhadap Layanan Kepegawain		
Level dalam Resntra	:	Kinerja Taktikal
Definisi Oprasional	:	Tingkat kepuasan terhadap layanan kepegawain merupakan level kepuasan terhadap layanan kepegawaian pada Badan Kesbangpol
Formula	:	Tingkat perhitungan rata-rata kepuasan terhadap layanan kepegawaian
Sumber Data	:	Bagaian Umum Kepegawaian
Penanggung jawab	:	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8. Jumlah Inovasi Per Bidang (1)		
Level dalam Resntra	:	Kinerja Taktikal
Definisi Oprasional	:	Banyaknya inovasi yang dihasilkan oleh bidang
Formula	:	Jumlah inovasi
Sumber Data	:	Bidang pada Badan Kesbangpol
Penanggung jawab	:	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
9. Persentase Rekomendasi Penanganan Konflik yang ditindak Lanjuti		
Level dalam Resntra	:	Kinerja Taktikal
Definisi Oprasional	:	Persentase konflik yang difasilitasi oleh Badan Kesbangpol
Formula	:	$\frac{\text{Jumlah Konflik yang difasilitasi}}{\text{Jumlah Konflik}} \times 100\%$
Sumber Data	:	Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

Penanggung jawab	: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
10. Jumlah Penyelenggaraan Pendidikan Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa	
Level dalam Resntra	: Kinerja Taktikal
Definisi Oprasional	: Banyaknya Penyelenggaraan Pendidikan Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa
Formula	: $\frac{\text{Jumlah Penyelenggaraan Pendidikan Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa yang dilaksanakan oleh Badan Kesbangpol dan partai politik}}{\text{Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik}} \times 100\%$
Sumber Data	: Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik
Penanggung jawab	: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
11. Persentase Penurunan Kasus Penyalahgunaan Narkoba	
Level dalam Resntra	: Kinerja Taktikal
Definisi Oprasional	: Merupakan Persentase Penurunan Kasus Penyalahgunaan Narkoba
Formula	: $\frac{(\text{Jumlah Kasus Penyalahgunaan Narkoba Tahun Berjalan}) - (\text{Jumlah Kasus Penyalahgunaan Narkoba Tahun Lalu})}{(\text{Jumlah Kasus Penyalahgunaan Narkoba Tahun Lalu})} \times 100\%$
Sumber Data	: Polres Pesisir Selatan
Penanggung jawab	: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
12. Persentase Penurunan Kasus Kenakalan Remaja	
Level dalam Resntra	: Kinerja Taktikal
Definisi Oprasional	: Merupakan Persentase Penurunan Kasus Kenakalan Remaja
Formula	: $\frac{(\text{Jumlah Kasus Kenakalan Remaja Tahun Berjalan}) - (\text{Jumlah Kasus Kenakalan Remaja Tahun Lalu})}{(\text{Jumlah Kasus Kenakalan Remaja Tahun Lalu})} \times 100\%$
Sumber Data	: Satuan Polisi Pamong Praja
Penanggung jawab	: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
13. Persentase Aspirasi Masyarakat yang diterima dari Perwakilan Partai Politik	
Level dalam Resntra	: Kinerja Taktikal
Definisi Oprasional	: Merupakan Aspirasi Masyarakat yang diterima dari Perwakilan Partai Politik
Formula	: $\frac{\text{Jumlah Aspirasi yang dilaksanakan}}{\text{Jumlah Aspirasi yang diajukan Masyarakat}} \times 100\%$
Sumber Data	: Sekwan dan Bappedalitbang
Penanggung jawab	: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
14. Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah yang disusun Tepat Waktu	
Level dalam Resntra	: Kinerja Operasional
Definisi Oprasional	: Merupakan waktu yang harus ditepati saat menyampaikan laporan terkait
Formula	: Waktu terakhir penyampaian laporan sesuai permintaan dari instansi terkait
Sumber Data	: Sub Bagian Program Anggaran dan Keuangan
Penanggung jawab	: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
15. Jumlah Dokumen Data Sektoral yang dikelola	
Level dalam Resntra	: Kinerja Operasional
Definisi Oprasional	: Banyaknya Dokumen Data Sektoral yang dikelola

Formula	:	Jumlah Dokumen Data Sektoral yang dikelola
Sumber Data	:	Bidang di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Penanggung jawab	:	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

16. Persentase Dokumen Kepegawaian Tepat Waktu

Level dalam Resntra	:	Kinerja Operasional
Definisi Oprasional	:	Merupakan dokumen segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan Kepegawaian yang disusun Tepat Waktu

Formula	:	$\frac{\text{Jumlah Dokumen Kepegawaian Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Keseluruhan Dokumen Kepegawaian}} \times 100\%$
---------	---	--

Sumber Data	:	Sub Bidang Umum dan Kepegawaian
Penanggung jawab	:	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

17. Persentase Layanan Surat Menyurat Sesuai SOP

Level dalam Resntra	:	Kinerja Operasional
Definisi Oprasional	:	Merupakan acuan penerapan langkah-langkah alur surat masuk baik internal maupun eksternal secara tertib dan teratur dalam layanan Surat menyurat

Formula	:	$\frac{\text{Jumlah Layanan Surat Menyurat Sesuai SOP}}{\text{Jumlah Layanan Surat Menyurat}} \times 100\%$
---------	---	---

Sumber Data	:	Sub Bidang Umum dan Kepegawaian
Penanggung jawab	:	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

18. Jumlah Pelatihan Kantor Sendiri

Level dalam Resntra	:	Kinerja Operasional
Definisi Oprasional	:	Pelatihan kantor sendiri dilakukan untuk peningkatan kapasitas sdm pegawai Badan Kesbangpol.

Formula	:	Jumlah Pelatihan Kantor Sendiri
---------	---	---------------------------------

Sumber Data	:	Sub Bagian Program Anggaran dan Keuangan
-------------	---	--

Penanggung jawab	:	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
------------------	---	-----------------------------------

19. Jumlah Data Konflik

Level dalam Resntra	:	Kinerja Operasional
Definisi Oprasional	:	Merupakan kegiatan pendataan pengumpulan data konflik yang ada di Pesisir Selatan

Formula	:	Jumlah Data Konflik
---------	---	---------------------

Sumber Data	:	Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik
-------------	---	--

Penanggung jawab	:	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
------------------	---	-----------------------------------

20. Jumlah Masyarakat yang Mengikuti Penyelenggaraan Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa

Level dalam Resntra	:	Kinerja Operasional
Definisi Oprasional	:	Merupakan Masyarakat yang Mengikuti Penyelenggaraan Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa

Formula	:	Jumlah Masyarakat yang Mengikuti Penyelenggaraan Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa
Sumber Data	:	Sub Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa

Penanggung jawab	:	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
------------------	---	-----------------------------------

21. Jumlah Penyelenggaraan Pencegahan Pekat

Level dalam Resntra	:	Kinerja Operasional
---------------------	---	---------------------



Definisi Oprasional	: Merupakan kegiatan yang dilakukan untuk pencegahan Pekat
Formula	: Jumlah Penyelenggaraan Pencegahan Pekat
Sumber Data	: Sub Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Agama
Penanggung jawab	: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

22. Jumlah Penyelenggaraan Pengawasan Pekat

Level dalam Resntra	: Kinerja Operasional
Definisi Oprasional	: Merupakan kegiatan yang dilakukan untuk pengawasan Pekat
Formula	: Jumlah Penyelenggaraan Pengawasan Pekat
Sumber Data	: Sub Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Agama
Penanggung jawab	: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

23. Persentase Lembaga Politik (Partai/Ormas) yang Sesuai dengan Regulasi

Level dalam Resntra	: Kinerja Operasional
Definisi Oprasional	: Merupakan Partai/Ormas yang terdaftar di Kemenkumham dan sesuai dengan standar yang ada.
Formula	: $\frac{\text{Jumlah Partai dan Ormas yang sesuai dengan regulasi}}{\text{Jumlah Partai dan Ormas yang ada di pesisir Selatan}} \times 100\%$
Sumber Data	: Sub Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan
Penanggung jawab	: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK
KABUPATEN PESIR SELATAN.



HARDIDARMA PUTRA S.H. M.Si.
Pembina Tk. V (IV/b)
NIP. 196709011996021 001